MUHAMMAD TAUFIQ ABADI, M.M.

ZAHIR publishing

EKONOMI MONETER

SEBUAH PENGANTAR

Editor:
Muhammad Sultan Mubarok, M.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

EKONOMI MONETER
SEBUAH PENGANTAR

Muhammad Taufiq Abadi M.M.

ZAHIR publishing

EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR

Penulis
Muhammad Taufiq Abadi, M.M.

Editor
Muhammad Sultan Mubarok, M.E.

Tata Letak
Ulfa

Desain Sampul
Zulkarizki

14 x 20 cm, x + 169 hlm.
Cetakan I, Juli 2022

ISBN: 978-623-466-189-7 (PDF)

Diterbitkan oleh:
ZAHIR PUBLISHING
Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta
No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh segala puji bagi Allah, Allah yang telah memerintah-kan hamba-Nya agar senantiasa memperkaya akal dengan ilmu pengatahuan (iqra), mengisi hati dengan nilai-nilai keilahian (bismi rabbik), serta mengembangkan potensi kekaryaan (alladsi halaq). Demikian pula shalawat dan taslim penulis peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Sehingga umat Islam dituntut untuk mendayagunakan akal pikirannya dalam upaya menemukan kebenaran.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami Ekonomi Moneter dan juga berguna bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu tentang Ekonomi Moneter. Tentunya tidak ada karya yang sempurna, maka buku ini pun kemungkinan memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, maka besar harapan penulis mendapat masukan dan kritikannya dari semua pihak dalam penyempurnaan buku ini.

Penyelesaian buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, semoga Allah swt membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB 1
KONSEP DASAR EKONOMI MONETER 1
A. Tujuan Pembelajaran 1
B. Pendahuluan 1
C. Pengertian Ekonomi Moneter 1
D. Konsep Dasar Ekonomi Moneter 2
E. Konsep Dasar Moneter Konvensional 3
F. Konsep Ekonomi Moneter Syariah 6
G. Ruang Lingkup Ekonomi Moneter 8
H. Pengaruh Uang Terhadap Ekonomi 11

BAB 2
KONSEP DAN FUNGSI UANG 13
A. Tujuan Pembelajaran 13
B. Pendahuluan 13
C. Pengertian Uang 14
D. Jenis-Jenis Uang 15
E. Kriteria Uang 17
F. Fungsi Uang 19

BAB 3
KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN DAN HADIST 21
A. Tujuan Pembelajaran 21
B. Pendahuluan 21

C. Pengertian Uang Dalam Islam 22
D. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam 23
E. Jenis-Jenis Uang Dalam Islam..... 25
F. Fungsi Uang Menurut Pandangan Islam yang Didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist..... 29
G. Konsep Uang Dalam Al-Qur'an dan Hadist..... 33
H. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam 37

BAB 4
FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH..... 39
A. Tujuan Pembelajaran..... 39
B. Pendahuluan..... 39
C. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 40
D. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam..... 43
E. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah 44
F. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.. 47
G. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah..... 48

BAB 5
TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG..... 51
A. Tujuan Pembelajaran..... 51
B. Pendahuluan 51
C. Definisi Teori Permintaan Uang..... 52
D. Teori Permintaan Uang konvensional 52
E. Teori Permintaan dalam Ekonomi Islam..... 56
F. Definisi Penawaran Uang..... 60
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang 61
H. Keseimbangan Pasar Uang 62

BAB 6
TEORI MONETER ISLAM 65
A. Tujuan Pembelajaran 65
B. Pendahuluan 65
C. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islam 66
D. Teori Moneter Islam 71
E. Kebijakan Moneter Islam 78
F. Instrumen Moneter Islam 81

BAB 7
KRISIS MONETER 87
A. Tujuan Pembelajaran 87
B. Pendahuluan 87
C. Pengertian Krisis Moneter 88
D. Penyebab Terjadinya Krisis Moneter 88
E. Fenomena Krisis Moneter 89
F. Peranan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian 92

BAB 8
MONETER INTERNASIONAL 95
A. Tujuan Pembelajaran 95
B. Pendahuluan 95
C. Moneter Internasional 96
D. Pembayaran Internasional 97
E. Standar Moneter Internasional 103
F. Harga Valas 109
G. Badan Kewenangan Internasional 110

BAB 9
VARIABEL MAKROEKONOMI 115
A. Tujuan Pembelajaran 115
B. Pendahuluan 115
C. Suku Bunga 116
D. Inflasi 118
E. Jumlah Uang Beredar 121
F. Produk Domestik Bruto (PDB) 123
G. Pengeluaran Konsumsi (C) 126
H. Investasi (Penanaman Modal) 128
I. Pengeluaran Pemerintah (G) 129
J. Ekspor (X) 131
K. Impor (M) 134
L. Tingkat Bunga 135
M. Jumlah Uang Beredar (Ms) 137
N. Permintaan Uang (Md) 139

BAB 10
PASAR UANG 141
A. Tujuan Pembelajaran 141
B. Pendahuluan 141
C. Pengertian Pasar Uang 143
D. Jenis Pasar Uang 144
E. Mekanisme Pasar Uang 145

BAB 11
PASAR VALUTA ASING 151
A. Tujuan Pembelajaran 151
B. Pendahuluan 151
C. Pasar Valuta Asing 153

D. Karakteristik Pasar Valuta Asing 155
E. Proses Transaksi Pasar Valuta Asing 156

DAFTAR PUSTAKA 161
BIOGRAFI PENULIS 169

BAB 1
KONSEP DASAR EKONOMI MONETER

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu Memahami pengertian ekonomi moneter, konsep-konsep ekonomi moneter, secara umum dan islam, serta ruang lingkup ekonomi moneter.

B. Pendahuluan

Ekonomi Moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yang pertama adalah kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga.

C. Pengertian Ekonomi Moneter

Pengertian Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi membahas tentang peranan yang dalam mempengaruhi tingkat harga harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai "uang". Seperti halnya pasar

uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan (G *et al.*, 2022).

D. Konsep Dasar Ekonomi Moneter

Ekonomi Moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yang pertama adalah kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Pada tulisan ini saya sebagai penulis, akan mencoba menyajikan konsep-konsep dasar ekonomi moneter konvensional dan ekonomi moneter islam.

Ekonomi juga salah satu instrument penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian smodern terdapat dua kebijakan yaitu (Akbar, 2022):

1. Kebijakan Fiskal yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatan negara untuk tujuan-tujuan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak

diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

2. Kebijakan Moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter terbagi dua yaitu :
   a. Kebijakan Moneter Ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar disuatu Negara, apabila tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli disuatu negara akan terganggu.
   b. Kebijakan Moneter Kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

E. Konsep Dasar Moneter Konvensional

Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam pandangan ekonomi

konvensional maka tujuan memegang uang terdiri dari tiga keinginan, yaitu(Rahman, 2020) :

1. Tujuan transaksi Dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan
2. Tujuan Berjaga-jaga Sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang
3. Tujuan Spekulasi Dalam masyarakat yang menganut sistem ekonomi konvensional ini, maka fungsi uang yang tak kalah pentingnya adalah untuk spekulasi, dimana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu, jika menguntungkan bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cendrung mendepositokan saja uang, dengan harapan mendapat imbalan bunga.Selanjutnya terkait dengan konsep ekonomi Moneter Konvensional maka tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh Bank sentral. Bentuk Kebijakan Moneter ini terdiri dari Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kebijakan Moneter Kualitatif. Kebijakan Moneter Kuantitatif adalah merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. terdiri dari:
    a. Operasi pasar terbuka Pada masa inflasi maka Bang Sentral akan mengadakan operasi pasar terbuka dengan melempar surat-surat berharga

ke Bank umum, sehingga kelebihan uang di Bank Umum tidak menyebabkan inflasi, dan sebaliknya pada masa deflasi

b. Mengubah Tingkat Bunga dan Tingkat Disconto. Tingkat bunga dan tingkat disconto merupakan instrumen pemerintah dalam stabilisasi moneter, ketika inflasi maka pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan kebijakan menaikkan suku bungga sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, dan kestabilan moneter akan tercapai, dan begitu pula sebaliknya pada masa deflasi.

c. Mengubah Tingkat Cadangan Minimum Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengubah cadangan minimun bank-bank umum ketika inflasi maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank umum, dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, dan sebaliknya pada masa deflasi. Kebijakan Moneter kualitatif a) Pengawasan pinjaman secara selektif Melalui kebijakan ini maka pmerintah melalui bank sentral mengendalikan dan mengawasi peminjaman dan investasi-investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum. b) Pembujukan Moral Bank sentral melakukan pertemuan dengan bank-bank umum, malalui forum ini maka bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang

dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. c) mengambil asumsi bahwa berbicara tentang ekonomi moneter terkait tentang dua hal: 1) Tentang uang dan aspek yang terpengaruh olehnya dan 2) Tentang tingkat bunga dan semua aspeknya.

F. Konsep Ekonomi Moneter Syariah

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa mengunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai Jalur Dagang Selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut Jalur Dagang Utara. Sedangkan antara Syam dan Yaman disebut Jalur Dagang Utara-Selatan.

Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Dinar dan Dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham (Wijoyo, 2021).

Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang. Cek dan promissory notes lazim digunakan. Misalnya Umar Ibnu-Khaththab ra. Beliau menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah. Instrumen factoring (anjak piutang) yang baru populer tahun 1980-an, telah dikenal pula pada masa itu dengan nama al-hiwalah, tapi tentunya bebas dari unsur bunga.

Apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar/dirham diimpor. Sebalikanya, bila mereka mengimpor barang. Berarti dinar/dirham diekspor. Jadi dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung di dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat di katakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak ada larangan impor dirham dan dinar berarti penawaran elastis.

Sistem moneter mengunakan bimetallic standar, dengan emas dan perak (dalam bentuk uang dirham dan dinar) sebagai alat pembayaran yang syah. Nilai tukar emas dan perak pada masa ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar — dirham 1 : 10. Permintaan akan uang dilandasi hanya oleh dua motif, yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Mata uang dimpor, dinar dari romawi, dirham dari parsia dan disesuaikan dengan volume ekspor dan impor. Nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan atau

dirham sama dengan nilai nominal (face value) uangnya. Penawaran uang terhadap pendapatan sangat elastis. Tinggi rendahnya permintaan uang bergantung kepada frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jagaKanz (larangan menimbun uang). Deamnd money, elastis, karena tidak adanya hambatan terhadap impor ketika demand meningkat.

G. Ruang Lingkup Ekonomi Moneter

1. Fungsi dan Peran Penting Uang Dalam Perekonomian

   Sebelum masyarakat mengenal uang seperti sekarang pada awal mulanya seluruh kegiatan yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan alat pembayaran atau alat tukar dengan sistem barter (tukar menukar). Sistem barter adalah kegiatan tukar menukar terhadap suatu barang atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan atas kesepakatan bersama yang didasarkan atas kesepahaman bahwa alat penukar tersebut memiliki nilai konversi yang sama. Uang secara umum adalah suatu alat tukar yang digunakan dalam kegiatan transaksi pertukaran barang dan jasa, yang mana alat tukar tersebut dapat diterima dan digunakan secara luas dalam masyarakat. Dilihat dari bentuknya uang tidaklah harus berupa uang kertas maupun uang logam yang sekarang kita kenal selam ini, namun bentuknya bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya dan bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari

sebagai alat tukar yang sah dalam kelompok tersebut (Kuncoro, 2021).

2. Fungsi uang dalam kegiatan ekonomi

   Seperti yang telah diketahui bersama bahwa salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar dalam pembayaran. jika dilihat lebih dalam lagi, fungsi uang bisa dikategorikan ke dalam 2 fungsi, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan

   a. Fungsi Asli

      1) Uang digunakan untuk alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Dengan fungsi ini, keberadaan uang akan meniadakan kegiatan yang masih menganut sistem barter.

      2) Uang digunakan sebagai standar satuan harga atas nilai sebuah produk dan jasa. Sehingga akan memberikan kemudahan dalam menentukan perhitungan dalam kegiatan ekonomi dan petunjuk dalam perhitungan besar kecil keuntungan dan kerugian.

      3) Uang sebagai alat penyimpan nilai (valuta), maksudnya adalah penggunaan uang dapat ditahan dalam rangka mengurangi kemampuan daya beli untuk masa sekarang sehingga bisa digunakan untuk keperluan yang akan datang.

b. Fungsi Turunan

1) Uang adalah alat pembayaran yang legal atau sah secara hukum yang difungsikan untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia.
2) Uang sebagai alat dalam membayar jumlah hutang. Dengan adanya uang maka akan memudahkan dalam mengukur jumlah hutang yang ada sehingga memudahkan dalam pembayaran.
3) Uang sebagai alat untuk menentukan besar kecilnya nilai kekayaan. Meski kekayaan dapat dilihat adanya kepemilikan aset bergerak maupun tidak, namun penentuan jumlah kekayaan dihitung dengan nilai uang.
4) Uang sebagai alat pemindah kekayaan yang dimiliki seseorang. Aset tidak bergerak dapat dikonversikan dengan nilai uang tertentu sehingga bisa digerakkan dengan cara jual beli aset tersebut.
5) Uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi uang ditempatkan sebagai tolak ukur dalam suksesnya hasil kegiatan tersebut, sehingga dengan kondisi yang seperti ini akan mendorong terwujudnya kegiatan ekonomi semakin berkembang untuk memperoleh keuntungan tertentu.

H. Pengaruh Uang Terhadap Ekonomi

Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. pengaruh jumlah uang dan kredit pada terhadap kegiatan ekonomi yaitu (Sudarmanto *et al*., 2021):

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun berarti menunjukkan melambatnya perekonomian sebuah negara.
2. Tingkat suku bunga Meningkatnya jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi.
3. Daya beli masyarakat Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.
4. Harga pasar Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi. Sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukan untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi.

BAB 2
KONSEP DAN FUNGSI UANG

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami pengertian uang, Konsep dan fungsi uang, Kriteria dan Fungsi Uang, serta Jenis-jenis Uang.

B. Pendahuluan

Uang secara luas merupakan sesuatu yg bisa diterima secara umum menjadi indera pembayaran pada suatu daerah eksklusif atau menjadi indera pembayaran utang atau menjadi indera buat melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan istilah lain, bahwa uang merupakan alat yang bisa di pakai dalam melakukan pertukaran baik barang juga jasa pada suatu daerah tertentu. Pengertian secara generik uang nir hanya berfungsi sebagai indera tukar, akan tetapi juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya misalnya sebagai indera satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagair standar pencicilan uang. Memiliki harta berharga atau kekayaan dalam wujud tertentu merupakan hal yang menunjukkan kemampuan finansial suatu individu. Hal berharga terkecil dan paling dikenal di antaranya adalah uang, keberadaan uang seakan menjadi penentu perekonomian.

C. Pengertian Uang

Uang memang menjadi hal yang di anggap penting untuk mendukung kondisi perekonomian dan juga sebagai pemenuh kebutuhan, tetapi terkadang kita mengabaikan pengertian uang yang sebenarnya. Pengertian uang dibagi menjadi dua yaitu pengertian dalam ilmu ekonomi tradisional dan modern. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut juga uang barang (S. Harahap, 2019).

Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Adapun pengertian uang menurut para ahli. Munurut S Sayers, uang adalah sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran hutang. Sedangkan menurut Irna Rahmawati, uang diartikan sebagai benda yang mampu dinterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat tukar menukar dalam transaksi perdagangan.

D. Jenis-Jenis Uang

1. Jenis Uang Berdasarkan Bahan Pembuatannya (Ichsan, 2020)

   - Uang Logam

     Uang logam merupakan uang yang terbuat berdasarkan logam, umumnya menurut emas atau perak karena kedua logam itu mempunyai nilai yg cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak gampang hancur, tahan usang, & bisa 6 dibagi menjadi satuan yg lebih mini tanpa mengurangi nilai. Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang logan dinilai menurut nilai intrinsiknya. Tapi ketika ini, uang logam tidak dinilai berdasarkan berat emasnya, namun berdasarkan nilai nominalnya.

   - Uang Kertas

     Uang kertas adalah uang yang terbuat berdasarkan kertas menggunakan gambar dan cap tertentu dan adalah alat pembayaran yg sah. Menurut penjelasan UU no. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, yang pada maksud dengan uang kertas merupakan uang dalam bentuk lembaran yang terbuat menurut bahan kertas bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

2. Jenis Uang Berdasarkan Nilainya (Sudarmanto et al., 2021)
    - Uang Penuh (*fully bodied money*)

      Nilai uang dikatakan menjadi uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tadi sama nilainya dengan bahan yang dipakai. Dengan istilah lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik tekandung dalam uang tadi. Jika uang itu terbuat menurut emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
    - Uang Tanda (*Token Money)*

      Uang indikasi adalah bila nilai yang tertera diatas uang yg lebih tinggi berdasarkan nilai bahan yg digunakan buat membuat uang atau dengan istilah lain nilai nominal lebih besar dari nilai intinsik uang tersebut. Misalnya, untuk mebuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.
3. Jenis Uang Berdasarkan lembaga atau Badan Pembuatnya
    - Uang Kartal

      Merupakan uang yg diberi tanda atau cap oleh pemerintah, sehingga berlaku menjadi indera pembayaran yang absah dan dapat diterima umum.
    - Uang Giral

      Adalah simpanan atau deposito pada bank yg dapat diambil dengan menggunakan cek, giro,

atau surat perintah pembayaran lainnya yg dicetak atau dibuat sang bank generik atau bank komersial. Uang Giral yang beredar di warga terdiri atas cek dan giro. Cek adalah perintah yg diterima yg diterima menurut pihak lain sebagai alat buat pembayaran atau perintah kepada bank untuk membayar menggunakan uang tunai, dan giro merupakan buat memindahkan uang giral ke rekening orang lain namun permanen uang giral bukan uang tunai dan telegrafic transfer adalah pemindahan pembayaran atas suatu transaksi melalui bank.

4. Jenis Uang Berdasarkan Tempat
    - Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, pada luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku.
    - Uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya pada suatu negara, tetapi juga berlaku & diakui di berbagai negara pada global. Misalnya uang dolar, poundsterling, yen, euro, dan sebagainya.

E. Kriteria Uang

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan menjadi uang haruslah memenuhi persyaatan sebagai berikut (Jaya *et al*., 2022):

- Dapat diterima secara umum. Uang harus dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran

dengan nilai yang layak untuk proses pertukaran atau perdagangan.

- Memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu dengan jaminan pemerintah. Keberadaan uang harus memiliki nilai yang stabil tidak berubah-ubah atau telah ditetapkan.
- Mudah dibawa dan ringan. Uang merupakan benda yang portable sehingga mudah untuk di pindahkan
- Memiliki kualitas dan nilai yang telah ditentukan. Nilai dari uang biasanya ditentukan dari bahan bakunya, sehingga sudah tentu ini memiliki standar yang ditentukan.
- Terbuat dari bahan yang tahan lama. Selain memiliki nilai standar bahan baku yang digunakan untuk membuat uang harus merupakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak.
- Di buat dalam jumlah terbatas dan tidak dapat dipalsukan. Uang harus memiliki karakteristik yang tidak mudah untuk ditiru, hal ini merupakan upaya mempertahankan nilainya sebagai alat tukar dan pembayaran.
- Dapat dibagi tanpa mengurangi nilai dan kualitas. Pembagian uang tanpa mengurangi nilai dalam hal ini menunjukan pembagian tidak merusak uang tersebut melainkan uang memiliki pecahan yang sesuai untuk pembagian.
- Memiliki bentuk dan ukuran baku. Bentuk dan ukuran uang memang memiliki standar bahkan design khusus

sebagai karakter khusus yang khas dan tidak dapat ditiru.

F. Fungsi Uang

Kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk mengetahui fungsi uang dalam perekonomian. Sebagai alat untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan hidup, uang mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan (M. I. Harahap, 2020).

1. Fungsi Asli Uang

   Fungsi asli uang merupakan fungsi yang mengacu pada tujuan utama diciptakannya dalam uang satun tertentu.

   - Uang sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*), uang menggantikan sistem tukar menukar agar lebih mudah.
   - Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) yang artinya uang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa sehingga pertukaran dapat dilakukan dengan sepadan.
   - Uang sebagai alat penyimpan nilai (Valuta).

2. Fungsi Turunan Uang

   Fungsi turunan merupakan fungsi lain dari sekedar alat tukar menukar.

   - Sebagai alat pembayaran transaksi.
   - Sebagai alat pembayaran hutang.

- Sebagai alat pembentukkan dan pemindahan modal.
- Sebagai harga atau nilai.

BAB 3
KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN DAN HADIST

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu Memahami pengertian uang dalam islam, jenis uang dalam islam, Konsep uang dalam al qur'an dan hadist, fungsi uang dalam pandangan Al-Qur'an, serta uang dalam sistem ekonomi islam.

B. Pendahuluan

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya. uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modem. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dengan uang. Ketika jumlah manusia semakin bertambah, maka peradabannya pun semakain maju sehingga kegiatan dan transaksi antar sesama manusia semakin beragam. Maka dari itu, diperlukan alat tukar yang dapat diterima semua pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Alat tukar ini lah yang disebut dengan uang.

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Pada makalah ini akan membahas mengenai konsep uang dalam Islam yang meliputi konsep uang dalam Al-Qur'an dan hadits serta fungsi, jenis uang dalam Islam dan lain sebagainya.

C. Pengertian Uang Dalam Islam

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqúd. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an nagdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukan harga. Mereka menggunakan kata dinar dan untuk menunjukan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata wariq untuk menunjukan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukan dinar emas. Sementara fulüs (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Ichsan, 2020).

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak. Tetapi mencakup seluruh dinar, dirham, dan filas. Untuk menunjukan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulis termasuk kedalam istilah nuqud atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari

golongan Syafi'iyah, fulüs tidak termasuk RADE INT nuqud, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa nuqud mencakup fulús. Definisi nuqud menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, dinar Dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

D. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bawa uang itu adalah uang, uang bukan capital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam

ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkim, mengungkapkan konsep Irving Fisher menyatakan bahwa (Ilyas, 2016):

$$MV = PT$$

Keterangan:

M = jumlah uang

v = tingkat perputaran uang

P= tingkat harta barang

T = jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang (V) maka semakin besar income yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah flow concept. Fisher juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara kebutuhan memegang uang (demand for holding money) dengan tingkat suku bunga. Konsep fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi islam, bahwa uang adalah flow concept, bukan stock concept.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Mishkin adalah konsep dari marshall pigou dari Cambridge, yaitu:

$$M = KPT$$

Keterangan:

M = jumlah uang

P= tingkat harga barang

T= jumlah barang yang diperdagangkan

K=1/v

Walaupun secara matematis k dapat dipindahkan kekiri atau kekanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda (Huzain, 2022). Dengan adanya k pada pemasaran Marshall pigou diatas menyatakan bawa demand for holding money adalah ssuatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar daman for holding money (M). Untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Konsep ini berarti Marshall pigou mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (store of wealth). Dari uraian diatas, jelas kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan islam dan konvensional adalah islam memandang uang sebagai flow concept, dan konvensional memandang uang sebagai stock concept. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), ketika mengendap kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private good).

E. Jenis-Jenis Uang Dalam Islam

1. Uang barang (*commodity money*)

   Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan.

a. Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

b. Daya tahan (*durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai *store of value*.

c. Nilai tinggi

Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlakukan transaksi. Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual (Juliana, 2017).

2. Uang logam (*metalic money*).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sabagai alat tukar adalah perunggu, besi,

dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, munculah penggunaan emas dan perak sebagai uang.Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua bimetallic (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.

3. Uang bank (*bank money*) atau *an-nuqûd al-musyarraffiyah*

   Uang bank disebut dengan istilah uang giral. Yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral in merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada

orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
b. Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

4. Uang kertas (*token money*) atau *an-nuqûd al-waraqiyyah*

   Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurang seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi qpercetakan uang kerta dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik (Huzain, 2022).

F. Fungsi Uang Menurut Pandangan Islam yang Didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist

Fungsi Uang Dalam Islam sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of Exchange* dan *unit of account*. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari Fungsi uang tersebut (Ilyas, 2016):

1. Satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*)

   Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakanya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan (*medium of exchange*).

   Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Islam sangat menganjurkan uang dalam pertukaran.

Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter. Rasulullah sangat menyadari kesulitan dan kelemahan system pertukaran barter ini, oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Kebijakan Rasulullah dalam hal ini di jumpai dalam hadis-hadis seperti diriwayatkan oleh Atha Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Qudri. Dalam konsep islam tidak dikenal money demand for speculation hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Dari uraian di atas terlihat bahwa menurut ekonomi Islam, uang di pandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai), hal ini sesuai denbgan definsi uang yang

dirumuskan Taqyuddin An-Nabhani, dalam buku An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami. Menurutnya uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang di defenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa. Diterimanya peranan uang ini, secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai riba fadhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkaan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang. Kemudian, karena majunya peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar (Iqbal, 2019).

Nabi Muhammad saw menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya. Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media petukaran (*medium of exchange*) karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dihadapkan dengan barang dan jasa.

Contoh hadis yang secara gamblang dijumpai pada Hadis Shahih Muslim, sebagai berikut : Dari Abu Said r.a, katanya : "Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kurma dari mana ini ?" Jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW." Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus."

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, Abu Said Al Kudri menegaskan anjuran jual beli dari pada barter : "Ternyata Rasulullah SAW, tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan system barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba didalamnya". Peranan uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari hadits Nabi Saw, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat atas aset moneter (emas dan perak). Secara tidak langsung Nabi mengatakan, bahwa uang sebagai faktor produksi mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha-usaha produktif yang riil. Apabila uang diterima sebagai pilar produksi, maka ketentuan pengambilan manfa'at keuntungan (hasil), tidak boleh ditentukan di awal tanpa

melihat hasil realisasi produksi tersebut. Penetapan porsi keuntungan di awal adalah riba dan bersifat tidak adil. Karena itu Islam menkonsepsikan bagi hasil dalam dunia bisnis.

G. Konsep Uang Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Beranjak dari sejarah dan asal usul uang sebagai alat tukar, maka dapat diperoleh gambaran tentang pengertian uang itu sendiri, namun akan lebih baik bila diulas terlebih dahulu bagaimana uang dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam. Uang dalam bahasa arab diartikan النقد yang merupakan bentuk jamak النقود yang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh atau ditangguhkan, mengikuti نقدا، ينقد، نقد Adapun kata النقود merupakan istilah modern yang menunjukkan pada sesuatu yang diberikan sebagai harga atau tanda serah terima barang atau jasa. Dan bentuk النقود dalam pengertiannya yang modern tidak ditemukan dalam al Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hadits ditemukan sebagai bentuk masdar dari دقن .Penyebutannya dalam al-Qur'an dan hadits hanya berupa kata-kata yang menunjukkan nama atau bentuk-bentuk dan macam-macamnya lain10-lain Dan المال، الدرهم، الذهب، الورق، البضاعة، الفضه :seperti Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang permasalahan uang dalam berbagai term sebagaimana disebutkan di atas antara lain :

1. Q.S. Ali Imran :75 yang Artinya: "Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya

kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali kamu selalu menagihnya." (Q.S. Ali Imran :75)

2. QS. Al-Taubah : 34 Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka mendapat) siksa yang pedih." (Q.S. Al-Taubah : 34).
3. Q.S. Al-Kahfi: 19 Artinya: "Maka suruhlah salah satu diantara kamu pergi ke kota membawa uang perakmu ini...."(Q.S. Al-Kahfi :19)
4. Q.S. Yusuf: 20, 62, 65, 88 Artinya :"Dan Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf." (20). Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar) kepunyaan mereka ke dalam karung mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi (62). "Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang (penukaran) mereka dikembalikan kepada mereka., Mereka berkata: "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita (65) Maka, ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga

maka sempurnakanlah timbangan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami" (88).

Adapun hadits-hadits seputar uang tidak menyebutkan kata النقود, tapi : jenis-jenis atau bentuk-bentuk uang yang berlaku saat itu seperti: الذهب، الفضه، ألدينار، الدرهم.Namun tentu saja benda-benda tersebut berfungsi sebagai uang. Beberapa hadits yang dimaksud antara lain:

1. Sunnah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan sarana perputaran (sirkulasi): ini berikut hadits dalam tersebut sebagaimana

عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إستعمل رجالً على خيبر، فجأه بثمر جنيب، فقال : أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال:ل، وهللا يا رسول هللا أنا لتأخذ الصناع من هذا بالصناعين، والصناعين بالثالث، فقال لتفعل، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

Artinya: "*Dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah Semoga Allah meridloi keduanya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki untuk pergi ke Khaibar, lalu ia datang dengan membawa kurma janib (kurma dengan kualitas yang baik). Rasulullah bertanya: "Apakah yang kumakan ini kurma Khaibar?". la menjawab: bukan Ya Rasulullah, demi Allah aku mendapatkannya dengan (menukar) satu sha' kurma ini (janib) dengan dua sha' kurma khaibar dan dua sha' dengan tiga sha'. Maka Rasul bersabda: "Jangan lakukan itu, juallah semua kurmamu untuk mendapatkan uang (dirham) kemudian belilah kurma janib dengan uang dirham tersebut*".

Hadits tersebut berlaku pada pertukaran emas dan perak dengan barang lain. Hal ini menunjukkan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar terhadap suatu barang. Emas dan perak merupakan pengukur nilai sesuatu dan dengan emas dan. peraklah diketahui batasan dan ketentuan syar'i seperti nisab zakat dan ketetapan diyat. Seperti hadits-hadits berikut ini:

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (رواه الشيخان)

Artinya: "*Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya*" (HR Bukhori Muslim).

عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى هللا عليه وسلم : ليس في أقل من عشرين مثقالً من الذهب وّلفي أقل من مئتي درهم صدقة

Artinya: "*Dari Amr Ibn Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW Tidak dikenai zakat kecuali dalam 20 mitsqal emas dan tidak ada zakat kecuali dalam 100 dirham perak*."

Dari segi fungsinya sebagai sarana pertukaran dan pengukur nilai, emas dan perak harus dijaga dari pengerusakan dan penghancuran, dilarang memalsukan serta menyalahgunakannya.

نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا

Artinya: "*Rasulullah SAW melarang melebur dirham untuk dijadikan perak Batangan dan melebur dinar untuk dijadikan emas batangan.*"

2. Rasulullah sendiri pernah menggunakan emas dan perak dalam kehidupan pribadinya seperti tampak dalam hadits berikut ini :

عن على كرم هللا وجهه قال : زوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة رضي هللا عنها على أربعمئة وثمانين درهما

Artinya: "*Dari Ali Semoga Allah memuliakannya ia berkata: Rasulullah SAW menikahkan aku dengan Fatimah RA dengan 480 dirham*" (Iqbal, 2019).

H. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dll dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat. Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif.

Akibattnya dalam ekonomi konvensional dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sekttor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Huzain, 2022).

Diktonomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan dungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

BAB 4
FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Lembaga keuangan syariah, dasar hukum Lembaga keuangan syariah, fungsi dan peranan Lembaga Keuangan Syariah, serta tujuan Lembaga keuangan syariah.

B. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam system ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan- aturan dalam system ekonomi itu sendiri. lembaga keuangan diperlukan untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi yang melekat pada uang. Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu lembaga keuangan bank dan non bank menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, secara otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Oleh karena itu banyak inovasi-inovasi dari lembaga keuangan baik bank maupun non

bank. Baitul mal wa tamwil dan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Karena lembaga-lembaga tersebut langsung bersentuhan dengan industri mikro yang dijalankan oleh masyarakat luas (Lariba, 2011).

Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) seharihari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan islam. Sehingga lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (syariah) sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian semua transaksi yang dioperasionalkan tidak lepas dari aturan syariat dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.

C. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan,

melakukan penghimpunan dana penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataanya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Arif, 2012).

Lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya,baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah. Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karenafungsinya sebagai mediator

antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, ada beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu : lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks (IAIB) dan sebagainya.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Huda & Heykal, 2010) :

1. Lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan juncto undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008.
2. Lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariahbukan bank Adapun

lembaga keuangan nonbank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing, bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud. Kesimpulannya adalah bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islambaik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

D. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di kawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang

konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern (Siagian, 2021). Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi berpedoman pada al-Qur'an pada sural al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

E. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah diantaranya yaitu sebagai Penyedia Jasa Finansial, merupakan bagian terintegrasi dari unit yangdiberi kuasa mengeluarkan uang giral, lembaga yang diberikan izin dalam menciptakan uang, dan merupakan bagian terintegrasi dalamjaringan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk

melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu(Soemitra, 2017a) :

1. Pengalihan asset (*asset transmutation*) Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Transaksi (*transaction*) Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
3. Likuiditas (*liquidity*) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya
4. Efisiensi (*efficiency*) Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut (Soemitra, 2017b) :

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

2. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
4. Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

F. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa prinsip operasional dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah(Arif, 2012) :

1. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan konstribusi dan resiko masing- masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama.Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transpasi, dalam hal ini sebuah Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapatmengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

4. Universal, yaitu prinsip di mana Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam operasional lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang dibawah ini meliputi :

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu, (nasi'ah).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepadasuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah.
5. Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya.

G. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu: a) Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. b) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antar lain melalui: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan menghasilan masyarakat. c) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid antara lain : a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi

kesenjangan social ekonomi, dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha 2) Meningkatkan kesempatan kerja 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak 4). Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. 5). Mendidik dan membimbing untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Arif, 2012)

BAB 5
TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan definiai teori permintaan dan penawaran uang, teori permintaan konvensional dan syairah, teori penawaran uang konvensional dan syariah,

B. Pendahuluan

Dewasa ini, dalam ekonomi makro kita telah mendengar teori permintaan dan penawaran uang. Teori ini bertujuan untuk mengetahui laju masuk dan keluarnya mata uang. Sehingga pemerintah yang berwenang atau negara dapat mengatur hal tersebut secara bijak di dalam kebijakan moneter agar permasalahan-permasalahan ekonomi seperti inflasi ataupun deflasi dapat diminimalisir sebaik mungkin. Dalam ekonomi islam, pandangan terhadap permintaan dan penawaran uang ini relatif sama dengan ekonomi konvensional.

Titik perbedaannya hanya pada norma dan moral yang islami yang merupakan prinsip dalam berekonomi yang merupakan faktor penentu suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya permintaan (*demand*)

dan penawaran (*supply*). Karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi antara satu sama lain

C. Definisi Teori Permintaan Uang

Permintaan uang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang Yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan (Sukirno, 2000:275). Uang tidak hanya Terdiri dari uang kertas dan uang logam saja (uang kartal) tapi juga dengan memasukkan semua aktiva finansial yang dapat menjadi substitusi uang. Hal ini merupakan perwujudan dari Semakin berkembang luasnya pelayanan yang diberikan oleh Lembaga-Lembaga Keuangan. Sehubungan dengan itu ada beberapa definisi uang yang masing-masing berbeda sesuai dengan tingkat likuiditasnya yaitu kemampuan uang-uang tersebut untuk segera dapat ditukarkan Dengan barang (Roswita, 2003:11).

D. Teori Permintaan Uang konvensional

Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga, Permintaan menunjukkan tinggi atau Rendahnya permintaan mengenai suatu Barang dan jasa dari pembeli. Banyaknya Komoditas barang yang diminta di pasar Dengan harga yang telah ditentukan pada Jumlah pendapatan tertentu serta pada Periode tertentu disebut permintaan.

1. Permintaan dalam Ilmu ekonomi Memiliki arti yaitu, bahwa jumlah dari Suatu barang yang mau dan mampu Dibeli pada berbagai kemungkinan harga,

Selama jangka waktu tertentu, dengan Anggapan hal-hal lain tetap sama.

2. Permintaan merupakan jumlah dari suatu Barang atau jasa yang mampu dibeli pada Berbagai kemungkinan harga selama Jangka waktu tertentu, dengan anggapan Hal-hal lain tetap sama/ cateris paribus.
3. Kegunaan dari teori permintaan ialah Untuk menetapkan berbagai faktor yang Mempengaruhi permintaan. Jumlah permintaan barang akan berbanding terbalik Dengan harga. Hubungan antara harga Dengan jumlah permintaan hampir berlaku dalam kegiatan ekonomi.
4. Ada beberapa penentu permintaan: Harga barang, harga barang lain yang Berkaitan erat dengan barang tersebut, Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita Rasa mayarakat, jumlah penduduk, dan Ramalan keadaan di masa datang.

Dalam teori permintaan uang konvensional, kita sering mendengar teori klasik dan keynes Di bawah ini kami akan sedikit menjelaskan terkait hal tersebut.

Teori Klasik Salah satu teori Klasik yang mengupas mengenai permintaan uang adalah Teori Kuantitas Uang. Teori ini membahas permintaan sekaligus penawaran uang beserta interaksi antara Keduanya yang berfokus pada hubungan antara penawaran uang, permintaan uang dengan Nilai uang (tingkat harga). Teori permintaan Klasik ini awalnya dikenalkan oleh Irving Fisher Dengan teori

kuantitas uangnya. Secara sederhana Irving Fisher (dalam Mishkin, 2008:187) Merumuskan teori kuantitas sebagai berikut :

MV = PT.....(2)

Dimana:

M = Permintaan uang;

V = Perputaran atau percepatan transaksi dari uang;

P = Harga ratarata per transaksi;

T = Volume Transaksi yang dilakukan dalam satu tahun.

Persamaan MV = PT menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh Pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini yang dimaksud Dengan M adalah uang kartal ditambah dengan uang giral. Begitu pula untuk V seperti diketahui bahwa klasik (dalam Roswita. 1994:81) beranggapan : (a). Uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga; (b). Dalam jangka pendek *Velocity of Money* tetap dan; (c). Barang dan Jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai *full employment*. · Teori Permintaan Uang Keynes Ketika ekonomi klasik cenderung menekankan penggunaan uang dalam melakukan Transaksi. Keynes mengidentifikasikan tiga motif memegang uang yaitu: motif bertransaksi. Motif berjaga-jaga. Dan motif berspekulasi (dalam Roswita. 1994:82-83).

1. Permintaan Uang untuk Transaksi Menurut Keynes (dalam Sahabat. 2009:17-18) permintaan uang kas untuk tujuan transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan

semakin Besar keinginan untuk bertransaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang Yang pendapatannya lebih rendah. Permintaan uang menurut Keynes mengikuti jejak Kaum klasik yang menyatakan bahwa permintaan uang untuk transaksi tergantung dari Pendapatan. Namun Keynes berbeda dengan kaum klasik dalam hal penekanan pada motif spekulasi dan peranan tingkat bunga untuk spekulasi.

2. Permintaan Uang untuk Berjaga-jaga Permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dari ketidaktentuan yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes dianggap bahwa permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga adalah fungsi dari tingkat pendapatan. Fungsi Adalah skala yang menunjukkan volume keinginan uang tunai aktif (saldo tunai) untuk Transaksi dan berjaga-jaga pada berbagai tingkat pendapatan. Jika pendapatan naik maka Saldo tunai (permintaan uang) yang diinginkan akan naik (dalam Roswita, 1994:84) Permintaan Uang untuk Spekulasi Menurut Keynes masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi keperluan Transaksi karena adanya keinginan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Uang kas yang disimpan ini berarti berfungsi sebagai *store of value* atau permintaan uang Untuk menimbun kekayaan. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat Bunga. Semakin tinggi tingkat

bunga semakin rendah keinginan masyarakat akan uang Kas untuk spekulasi (dalam Mishkin, 2008:192). Motif memegang uang untuk tujuan spekulasi terutama ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Keynes membatasi keadaan bahwa pemilik kekayaan bisa memilih memegang Kekayaannya dalam bentuk tunai atau obligasi. Uang tunai dianggap tidak memberikan Penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang Tertentu setiap periodenya (dalam Rahayu, 2012:14)

E. Teori Permintaan dalam Ekonomi Islam

Keinginan hasrat terhadap sesuatu Barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thoyyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan Dalam teori permintaan perspektif Islam Ialah ketika menilai atau menentukan Komoditi (barang atau jasa) bahwa tidak Semua bisa digunakan atau dikonsumsi, Alasannya karena harus bisa membedakan Antara kmoditi (barang atau jasa) yang Halal dan haram. Di dalam fungsi permintaan juga Diartikan sebagai pendekatan yang maslahah, dimana mashlahah ini bisa diukur Dalam satuan nominal, dengan memperoleh mashlahah yang maksimum atau Optimal dalam konsumsi maka konsumen Akan mencapai falah atau kesejateraan. Pendapat Ibnu Taimiyah ada hal-hal Yang mempengaruhi permintaan, yaitu: Keinginan dari masyarakat mengenai Suatu barang yang bermacam-macam Jenisnya, dan keinginan selalu tidak sama, Jumlah

dari calon pembeli pada suatu Barang, kualitas konsumen yang mana Memiliki pendapatan atau gaji menjadi Salah satu ciri kualitas konsumen yang Baik, tingkat kebutuhan suatu barang, Metode dalam pembayarannya tunai atau Angsuran, besarnya dalam transaksi ketika biaya transaksi dari suatu barang Mengalami penurunan maka akan terjadi Permintaan menjadi naik. Menurut Karim (2008: 187-191) dalam bukunya "Ekonomi Makro Islami", mengatakan, ada tiga mazhab (aliran) yang mengungkapkan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Mazhab itu antara lain mazhab iqtishaduna, mazhab Mainstream dan mazhab alternatif.

Permintaan Uang Mazhab Iqtishaduna Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk transaksi juga semakin meningkat. Fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya transaksi pembelian barang atau jasa yang tidak dilakukan secara tunai. Zaid ibn Ali Zainal abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib membolehkan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dalam perniagaan komoditi secara kredit. Apabila harga bayar di kemudian hari meningkat, maka akan mengurangi permintaan uang riil, karena orang akan lebih senang memegang barang yang akan meningkat harganya pada masa mendatang,

dibandingkan memegang uang dalam bentuk tunai. Pada masa Rasulullah, permintaan uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Apabila permintaan uang untuk transaksi meningkat, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga akan mengalami penurunan.

Permintaan Uang Mazhab Mainstream Seperti halnya pada mazhab Iqtishaduna, dimana permintaan uang hanya dikategorikan dalam dua hal yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga Perbedaan diantara kedua mazhab ini terlihat ketika membahas masalah perilaku permintaan uang untuk berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan hoarding money atau penimbunan kekayaan, karena penimbunan kekayaan ini dianggap sebagai sebuah "kejahatan" penggunaan uang. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab Mainstream. Dues of idle cash atau pajak atas aset produktif yang menganggur bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan produktif. Pengenaan pajak akan berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan aset ini akan berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Penurunan permintaan uang untuk motif

berjaga-jaga ini akan meningkatkan permintaan uang untuk motif transaksi, sehingga meningkatkan *velocity of money*. Peningkatan *velocity of money* diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan nasional secara agregat.

Permintaan Uang Mazhab Alternatif Permintaan uang dalam mazhab alternatif erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Karim (2008) dalam bukunya mengatakan teori endogenous uang dalam Islam secara sederhana dapat diartikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanya representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil. Permintaan uang menurut Choudhury (1997) adalah representasi dari keseluruhan transaksi dalam sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang pun akan meningkat. Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang meliputi variabel-variabel sosio-ekonomi, kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian. Permintaan uang (dan

juga penawaran uang) dalam mazhab ini dipengaruhi oleh besarnya profit sharing atau *expected rate of profit*. Tinggi rendahnya *expected rate of profit* ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi. *Expected rate of profit* merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor riil. Apabila *expected rate of profit* yang akan didapatkan dari kegiatan investasi di sektor riil meningkat, maka penawaran investasi juga akan meningkat. Peningkatan penawaran investasi akan menyebabkan penurunan jumlah uang kas riil yang dipegang masyarakat. Artinya, peningkatan *expected rate of profit* menjadikan orang berkeyakinan bahwa memegang uang tunai yang berlebih mengandung kerugian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Akibatnya, seseorang akan menyesuaikan berapa besar permintaan uang kas (tunai) yang dipegang terhadap besarnya *expected rate of profit*.

F. Definisi Penawaran Uang

Penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang yang beredar. Dalam perekonomian modern uang tidak hanya uang kartal tapi juga uang giral. Pemerintah tidak mempunyai kekuasaan langsung untuk menentukan besarnya uang giral yang beredar. Uang giral (saldo - saldo rekening koran) diciptakan oleh bank-bank umum sesuai dengan permintaan dari para nasabahnya. Jadi jumlah uang beredar merupakan hasil bersama dari perilaku pemerintah (bank sentral), bank-

bank umum dan masyarakat (khususnya nasabah-nasabah bank), walau sebenarnya bank sentrallah yang mempunyai pengaruh paling besar Hal ini disebabkan pemerintah memegang monopoli penciptaan uang kartal, sedangkan bank-bank umum hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah uang kartal yang dipegang bank tersebut (M. I. Harahap, 2020). Dan tanpa uang kartal tidak akan ada uang giral. Melalui kebijakan-kebijakan moneter, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar. Faktor – faktor tersebut antara lain (Widodo, 2015):

1. Pendapatan Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar dan jumlah yang diminta di masyarakat. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat rendah, maka semakin kecil pula jumlah uang yang beredar dan yang diminta di masyarakat. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan.
2. Tingkat Suku Bunga Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Bila suku bunga rendah maka orang cenderung enggan menabung di bank. jumlah uang beredarpun akan meningkat.

Sebaliknya, bila suku bunga bank tinggi, banyak orang yang tertarik untuk menyimpan uang di bank, efeknya jumlah uang yang beredar juga akan berkurang. Dengan begitu orang akan lebih baik memilih untuk menabung di bank daripada untuk berspekulasi.

3. Harga Barang Pada saat harga barang naik, maka peredaran uang akan semakin cepat karena dibutuhkan banyak uang untuk membeli barang tersebut. Sehingga dalam hal ini harga barang atau jasa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
4. Fasilitas Kredit Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika masyarakat suka akan penggunaan kredit, maka dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang. Begitu juga sebaliknya.

H. Keseimbangan Pasar Uang

Pengertian Pasar Uang dan kurva LM Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunya jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang riil. Kurva LM menggambarkan hubungan diantara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi

tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang riil, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas (Ichsan, 2020).

Seperti pada gambar di bawah Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah maka kurva LM akan bergeser ke kanan (dari Lm0 ke Lm1). Begitu pula sebaliknya jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Pergeseran Kurva LM-peningkatan *money supply* Gambar Pergeseran Kurva LM- Penurunan *money supply* Kurva IS-LM Kurva LM terjadi disebabkan adanya *Money Demand* (Permintaan Uang) sama *Money Supply* (Penawaran Uang). L = M, dimana: L , adalah jumlah likuiditas (uang) dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral. Dan M, adalah jumlah uang (*money*) yang ingin dipegang masyarakat. Dalam notasi lain ditulisan Ms = Md, dimana: Ms, adalah *money supply*/penawaran uang oleh bank sentral. Md, adalah *money demand*/ permintaan uang oleh masyarakat. Sedangkan kurva IS dapat ditunjukkan dengan I = S, dimana: I adalah Investasi S adalah *saving* (tabungan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseimbangan umum atau keseimbangan IS-LM merupakan keseimbangan perekonomian.

Secara general antara sektor rill dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan Umum terjadi pada waktu Pasar Barang dengan Pasar Uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi

Keseimbangan Umum, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di Pasar Barang maupun di Pasar Uang.

BAB 6
TEORI MONETER ISLAM

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan system moneter islam, teori moneter dalam islam, kebijakan moneter islam, serta instrument moneter islam.

B. Pendahuluan

Sistem moneter yang berlaku didunia sekarang ini keberadaannya telah ada setelah melalui beberapa masa evolusi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah bimetallic standard dimana emas dan perak (dinar dan dirham) bersirkulasi secara terus-menerus. Berhubungan dengan turunya rasio dinar dan dirham secara terus menerus, nilai tukar antara dinar dan dirham telah berfluktuasi secara lebar pada perbedaan waktu dan dalam perbedaan bagian-bagian negara Muslim. Amerika Serikat telah mengadopsi bimetallic ini pada tahun 1792. Kemudian pada tahun 1873 Amerika untuk mencabut perak dari peredaran uang karena fluktuasi harga antara emas dan perak. Pada tahun 1880 standar internasional dan mayoritas negar-negara dari bimetallic dan silver monometallic beralih kepada standar emas dengan menjadikan emas sebagai basis mata uang mereka. Dibawah standar ini, nilai mata uang sebuah

negara secara sah ditentukan dengan berat yang tetap dari emas, dan otoritas moneter berkewajiban mengubah permintaan mata uang domestik kedalam emas yang secara legal telah ditetapkan tingkatnya.

Terjadinya krisis Amerika dan dibatalkannya perjanjian Bretton Wood pada tahun 1971 oleh Presiden Nixon, merupakan awal tidak diback upnya dollar denga emas. Sejak itu pula, tidak satupun Negara didunia ini memback up mata uangnya dengan emas. Sehingga mata uang yang berlaku bersifat fiat atau dekrit dan ini disebut dengan istilah managed money standard. Sejak berlakunya sistem managed money standard ini, ada dua fenomena yang terjadi. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dan kedua nilai tukar yang tidak stabil.

C. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islam

Sistem moneter modern saat ini sebagaimana tampak di banyak negara-negara di dunia, terdiri dari tiga level (Chapra, 2000):

1. Pemegang uang (*the public*) yakni para individu, para pebisnis dan unit-unit pemerintahan. *Public* sendiri memegang uang dalam bentuk *currency* (mata uang termasuk dalam bentuk coin) dan dalam bentuk rekening-rekening bank.
2. Bank-bank komersial (baik milik swasta maupun milik pemerintah) yang meminjam dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu-

individu, perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit pemerintahan.

3. Bank sentral, yang memonopoli permasalahan uang, melayani para bankir untuk pemerintahan pusat dan bank-bank komersial. Bank sentral memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah uang beredar.

Setidaknya dunia perekonomian, utamanya ekonomi moneter mengalami beberapa masa dengan mengenal beberapa bentuk strandar moneter yang berlaku. Antara lain lima bentuk standar moneter di bawah ini yaitu:

1. Standar kembar (bimetallism)
2. Standar emas
3. Fiat standar
4. Uang giral atau deposit money
5. Uang kuasi.

Sejarah perkembangan system moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu pernah dikenal dua system mata uang (*bimatalic standard*) yang terdiri dari emas dan perak. Aplikasi dari system tersebut tidak hanya diadopsi oleh Amerika sekikat pada tahun 1972, namun juga telah dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW yang pada masa itu menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak).

Stabilitas rasio peredaran dinar dibanding dirham hanya terjadi pada periode tertentu, yakni 1:10 hingga masa khilafah ke-4. Namun setelah periode ini rationya mengalami perubahan terus menerus hingga mencapai

rasio 1:150 diberbagai negara Islam. Ketidakstabilan tersebut mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang dinar dan menggunakan dirham sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Fenomena inilah yang pada abad ke-16 dikenal sebagai *Gresham's law,* yaitu: *bad money tends to drive good money out of circulation*.

Sedangkan di Amerika Sendiri rasio *gold-silver* pada awalnya hanya 1:15 namun berfluktuasinya harga kedua jenis metal tersebut menggiring USA mendemonetisasai silver pada tahun 1873. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk mengaitkan kedua jenis mata uang tersebut dalam suatu tingkat rasio tertentu sehingga akhirnya bimetallic standard tidak dapat dipakai lagi secara universal. Selanjutnya dimulailah masa monometalism dengan emas sebagai standar mata uang yang berlaku secara universal. Dalam perkembangannya emas sebagai standar uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu (N. H. Harahap *et al*., 2022):

1. *The gold coin standard*, dimana logam emas mulia merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar.
2. *The gold bullion standard,* dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
3. *The gold exchange standard,* dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar mata uang domestic (*domestic currency*) dengan mata uang asing (*foreign currency*)

yang mampu di *back-up* secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki.

Merupakan kesepakatan internasional di bidang moneter dimana mata uang merupakan *flat money* yang dapat dikonversikan kedalam emas pada tingkat harga tertentu.

Dengan perkembangan system keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier *(credit money*), yakni uang yang tidak di back-up oleh emas dan perak atau bisa dikatakan telah dimulainya *fully fledged managed money standard* yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas maupun perak. Dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa negara mencetak mata uang khusus hukumnya adalah boleh (mubah). Namun demikian, jika kondisi mengharuskan untuk mencetak mata uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan serta menghindari dominasi dan kendali negara asing, mencetak mata uang hukumnya dapat menjadi wajib. Selain itu tidak ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai standar moneter.

Keberadaan uang dalam perekonomian memberikan arti penting, ketidakadilan dari alat ukur ini yang disebabkan oleh instabilitasnya dapat mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relative berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya

secara merata, terdistribusinya pendapatan, pertumbuhan optimum dan ketenagakerjaan yang penuh serta stabilitas perekonomian. Dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya sebuah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar *fiduciery money* dengan menggunakan penggunaan suku bunga dan instrument lain yang dilarang syariah merupakan suatu keniscayaan.

Belum lama berselang, larangan Islam terhadap bunga (riba) secara umum dipandang sebagai suatu preposisi yang nyaris mustahil, dikalangan mayoritas intelektual muslim sekalipun. Situasi mulai berubah dalam beberapa decade terakhir. Kini, makin banyak literatur yang membahas persoalan ini dan perdebatanpun tidak lagi terbatas pada argumentasi teoritis. Mulai terjadi tradisi eksperimentasi dan pendirian institusi yang terus meluas. Ilmu moneter Islam tengah memulai babak baru. Sebelum sampai pada kondisi saat ini setidaknya ada tiga fase berbeda dalam pembentukan dan pengembangan disiplin ini (Wijoyo, 2021).

1. Pada pertengahan dasawarsa 1930-an, segolongan ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ilmu ekonomi, tetapi memiliki pemahaman yang tegas terhadap persoalan-persoalan sosioekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadapnya mencoba memecahkan persoalan bunga.
2. Didorong oleh hal-hal tersebut diatas yang berlangsung selama 20 tahun yang lalu. Dimana para ekonom muslim mulai membangun aspek-aspek tertentu dari system moneter Islam. Suatu analisa ekonomi tentang

pelaranagan terhadap riba dipaparkan dan pilar-pilar utama *system alternative* perbankan dan keuangan yang bebas riba dimunculkan.

3. Perkembangan parallel selama decade lalu mewakili tahap ketiga, dan terdiri dari usaha-usaha untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga finansial atau investasi yang beroperasi berdasarkan bebas bunga di tiga benua; Asia, Afrika dan Eropa (sekarang jumlah itu telah menjadi lebih dari 200), dua institusi tersebutdiantaranya: Bank pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) di Jeddah dan Dar al-Mal al-Islam di Bahamas dan Jenewa, beroperasi secara multinasional.

D. Teori Moneter Islam

Stabilitas nilai mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter. Karena stabilitas tersebut akan mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya stabilitas harga akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi rill yang optimum, perluasan kerja dan stabilitas ekonomi. Sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Stabilitas uang sebagai tujuan manajemen moneter, selain diartikan sebagai kekuatan nilai uang terhadap harga barang juga kekuatan nilai uang terhadap

mata lain sebagai syarat dari kekuatan struktur ekonomi (Rahman, 2020).

Manajemen moneter Islami dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang tentunya berpijak pada konsep awal uang dan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai sistem lainnya. Manajemen moneter yang sesuai dengan landasan syar'i ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi mengingat tiadanya bunga dan alat (instrumen) suku bunga diskon serta open market operation dalam bentuk surat berharga yang berbasis bunga. Tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran uang tanpa mekanisme bunga dan bagaimana kebijakan moneter dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran diatas. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui pencetakan defisit negara. Dalam islam yang digunakan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil.

Faktor pendukung percepatan perputaran uang disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang yang dianjurkan adalah dengan jalan *qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari sistem ini adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapatkan

pengalaman, informas, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Selanjutnya terdapat beberapa teori seputar pengaturan moneter dalam perspektif syari'ah, diantaranya (Chapra, 2000):

1. Permintaan Uang (*Money Demand*)

   Dalam sebuah perekonomian yang berbasis syari'ah, permintaan terhadap uang hanya akan lahir terutama dari motuf transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulasi pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada ekonomi kapitalis. Penurunan suku bunga dibarengi harapan terhadap kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan pada kebutuhan yang perlu serta mendesak dan kebutuhan yang tidak perlu serta kurang bermanfaat. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa permintaan akan uang akan terdiri dari dua komponen. Pertama, merupakan permintaan akan uang untuk memenuhi kebutuhan dan investasi produktif (*conspicious consumption*), Kedua, kebutuhan konsumsi yang menyolok boros, investasi yang tidak produktif serta spekulatif. Untuk itu, para ekonom muslim lebih mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yakni: a. Nilai-nilai moral; b. Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga dan; c. Tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga. Dalam

pandangan mazhab mainstream 15 pengenaan pajak terhadap aset yang menganggur (*dues of idlle funds*) merupakan salah satu strategi utama dan instrumen kebijakan moneter untuk menciptakan perputaran uang yang dinamis. Landasan filosofinya adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya untuk dimanfaatkan secara maksimum dan efisien. Dalam hal ini hoarding money atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan. Secara matematis, permintaan uang menurut mazhab ini dirumuskan sebagai berikut (Wijoyo, 2021):

$$Md = M\ d\ trans + M\ d\ prec$$

$$Md\ trans = f\ (Y)$$

$$Md\ trans + M\ d\ prec = f(Y, \mu)$$

Bila tingkat μ (*dues of iddle fund*) semakin tinggi, maka semakin kecil permintaan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya resiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik. Secara alamiah dalam kondisi ini orang akan berusaha memperkecil jumlah pajak kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan yang menganggur. Sebaliknya, apabila nilai μ relatif rendah, tindakan memegang uang atau menyimpan uang tunai relatif tidak beresiko. Tinggi rendahnya tingkat resiko menyimpan uang tunai (Ω) dipengaruhi oleh besarnya *dues of iddle fund* (μ) dikurangi resiko investasi (Ψ). Jadi $\Omega = \mu - \Psi$. Sedangkan menurut mazhab iqtishaduna, permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi

tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat.

2. Penawaran Uang (*Money Supply*).

   Ketika permintaan uang distabilisasikan dan dihubungkan dengan kebutuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagaimana agregat *money supply* bertemu dengan money demand sehingga terjadi equilibrium, selanjutnya bagaimana mengalokasikan *money supply* ini sesuai dengan kebutuhan untuk merealisasikan tujuan umum. Menurut Metwally, penawaran akan uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah (*legal tender*). Semasa Rasul, lembaga Baitul Mal merupakan prototipe bank sentral yang berfungsi menerbitkan uang dan menjaga nilai tukarnya agar stabil, juga mengontrol terhadap kepemilikannya.18 Diasumsikan penanaman uang sepenuhnya dipegang oleh bank sentral sehingga jika digambarkan dalam grafik akan terlihat kurva Ms bersifat *perfect inelastis*. Akibatnya, penawaran uang terbebas dari pengaruh tinggi rendahnya kebijakan biaya atas aset yang menganggur. Otoritas moneter menetapkan jumlah uang beredar berdasarkan proporsi terhadap pendapatan atau nilai transaksi. Grafiknya sebagai berikut: Kurva ini menggambarkan pergerakan M s1 dari dan ke M s2 tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai

μ, melainkan oleh variabel eksogen diluar sistem ini, yaitu bank sentral sebagai otoritas moneter. Sementara itu pergerakan μ hanya akan berdampak pada pergerakan sepanjang kurva M s. Suatu kondisi yang penting diciptakan bagi terwujudnya keseimbangan uang adalah seimbangnya persediaan uang dengan permintaan uang. Keterikatan keduanya juga dengan biaya atas aset produktif yang menganggur terlihat dalam grafik berikut (Chapra, 2000):

Jumlah uang beredar ditunjukkan oleh garis horizontal, sedangkan tingkat biaya adalah aset produktif yang mengangur ditujukan oleh garis vertikal. Kurva penawaran berbentuk inelastis menunjukan pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran uang karena adanya kebijakan otoritas moneter. Kurva permintaan memiliki lereng negatif dengan besarnya μ, sementara permintaan uang (baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga) berbanding terbalik dengan pajak oleh aset yang menganggur. Pada tingkat biaya μ, tingkat keseimbangan berada pada E1.

Apabila pada tingkat biaya μ1 permintaan akan uang melebihi kurva penawaran barang (misalnya M d 2), pemerintah berusaha mengalirkan uang tunai untuk masyarakat kepada transaksi di pasar baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan cara meningkatkan biaya menjadi μ2. Hal ini akan mendorong kurva permintaan bergeser ke atas (Md1) dan karena adanya peningkatan velositas uang dan pendapatan. Kenaikan μ2 menyebabkan terjadinya pergerakan Jumlah uang beredar ditunjukkan oleh garis horizontal, sedangkan tingkat biaya adalah aset

produktif yang mengangur ditujukan oleh garis vertikal. Kurva penawaran berbentuk inelastis menunjukan pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran uang karena adanya kebijakan otoritas moneter. Kurva permintaan memiliki lereng negatif dengan besarnya μ, sementara permintaan uang (baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga) berbanding terbalik dengan pajak oleh aset yang menganggur. Pada tingkat biaya μ, tingkat keseimbangan berada pada E1. Apabila pada tingkat biaya μ1 permintaan akan uang melebihi kurva penawaran barang (misalnya M d 2), pemerintah berusaha mengalirkan uang tunai untuk masyarakat kepada transaksi di pasar baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan cara meningkatkan biaya menjadi μ2. Hal ini akan mendorong kurva permintaan bergeser ke atas (Md1) dan karena adanya peningkatan velositas uang dan pendapatan. Kenaikan μ2 menyebabkan terjadinya pergerakan disepanjang kurva Md2 sehingga mencapai keseimbangan baru di titik E2. Pada tingkat ini keseimbangan adalah bergeser ke E2 sebagai konsekuensi perpotongan kurva Md2 dengan Ms (G *et al.*, 2022).

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi shock dalam pasar uang, misalkan kelebihan permintaan akan uang, bukan dengan cara mencetak uang tapi dengan mempengaruhi perilaku permintaan akan uang melalui pengenaan biaya terhadap aset yang dianggurkan. Kebijakan ini akan menghindari inflasi yang diakibatkan oleh kelebihan uang.

E. Kebijakan Moneter Islam

Dibutuhkan suatu sistem kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang secara makro yang dihadapi suatu negara. Salah satu langkah penting yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat suatu kebijakan di bidang moneter. Karena penting untuk menganalisa peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan kegiatan ekonomi kearah yang dikehendaki, yaitu mencapai kegiatan ekonomi yang tinggi (dan tingkat pengangguran yang rendah) tanpa inflasi (Kuncoro, 2021).

Suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang signifikan meskipun secara tidak langsung terhadap arah (*trend*) tingkat harga, *out put* dan nilai tukar suatu negara. Otoritas moneter atau Bank Sentral melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit bank serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kredit dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Pengaruh spesifik lainnya yaitu kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah maksimum suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu pada bank-bank dan menentukan proporsi saham yang dapat dibeli melalui kredit. Dalam hal-hal tertentu tindakan Bank Sentral dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah mengalami evolusi yang panjang sepanjang sejarah begitu juga kebijakannya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi perekonomian secara global dan kondisi setiap negara yang bersangkutan.

Sebagaimana kebijakan lain dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter perlu merefleksikan etos Islami dan hakikat ideologi Islam yang unik dan luas. Kebijakan moneter didesain untuk melengkapi kebijakan-kebijakan lain dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada tercapainya stabilitas nilai rill uang, kondisi tenaga kerja penuh dan tingkat pertumbuhan optimum tetapi juga pencapaian keadilan social ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam hal ini ada beberapa strategi dalam kebijakan moneter Islami, dimana permintaan uang akan naik secara alamiah karena motif permintaan dan berjaga-jaga. Kebutuhan inilah yang umum terjadi pada suatu tingkat pendapatan dan distribusinya. Lebih meratanya distribusi pendapatan akan menaikkan permintaan uang pada tingkat agregat karena semakin banyak orang yang dapat membeli barang-barang dan jasa.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga ini dibedakan pada kebijakan yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif bersifat melakukan kebijakan terpilih atas beberapa aspek dalam masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

1. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan: Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu melakukan jual beli surat-

surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar.

2. Kebijakan diskonto (*discount rate policy*), yakni membuat perubahan atas tingkat diskonto dan ringkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Kebijakan ini dapat mempengaruhi biaya uang.
3. Kebijakan tingkat cadangan minimum (*reserve requirement policy*), yaitu membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan di bank-bank umum dan mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan (tidak boleh disalurkan sebagai pembiayaan) (G *et al.,* 2022).

Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

1. Pengawasan pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan mana yang harus digalakkan atau dikembangkan.
2. Pembujukan moral (*moral suasion*), dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak dibidang moneter. Dimana bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu.

Mekanisme kebijakan moneter diharapkan tidak saja dapat membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan rill terhadap uang, tetapi juga

membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar rill dan mencapai sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Kebijakan moneter diarahkan untuk mengatur jumlah uang, ketersediaan dan biayanya. Sasaran-sasaran yang lazim dari kebijaksanaan moneter ini adalah kestabilan harga. Keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi tujuan-tujuan yang sebagian diantaranya juga merupakan sasaran dari kebijakan fiscal. Bank sentral yang diselenggarakan dibawah pengawasan pemerintah (Departemen Keuangan) mengusahakan tujuan akhir tersebut dengan menggunakan sejumlah alat demi kepentingan yang ingin dicapai.

F. Instrumen Moneter Islam

Instrument atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrument yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Instrument besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan intrumen moneter berupa (Kuncoro, 2021):

1. *Staturory Reserve Requirement* (Cadangan Wajib Minimum)

   Banyak bank sentral yang melakukan reduksi dan eliminasi cadangan minimum untuk menjadikan

bank lebih kompetitif. Akan tetapi dalam ekonomi Islam *dicount rate* dan open *market operation* tidak dapat diterapkan, maka instrument yang paling memungkinkan adalah bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dari dananya yang berasal demand deposits pada bank sentral sebagai cadangan wajib. Reserve requirement ini hanya berlaku untuk demand deposit, sedangkan mudharabah deposit tidak memerlukan cadangan deposit, karena mudharabah merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut dan memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi.

2. *Financing Ceiling*

   Selain *Reserve requirement,* keberhasilan manajemen moneter perlu juga mempertimbangkan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar tidak melampaui jumlah yang ditargetkan. Pembiayaan penting untuk menjamin total pembiayaan yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Misalnya di Sudan plafon pembiayaan untuk sektor priorotas di daerah tersebut adalah pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan lain-lain. Dengan ketentuan 90% dari dana pembiyaan harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut.

3. *Government Deposits*

   Instrumen moneter yang juga mempengaruhi cadangan dari bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand

deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen Ini terbukti cukup efektif di Saudi Arabia terutama dalam mempengaruhi cadangan bank komersial secara langsung dan fungsinya sama seperti open market operation yang mempengaruhi cadangan bank komersial secara tidak langsung.

4. *Common Pool*

   Common pool adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

5. *Moral Suasion*

   Merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi perbankkan secara umum.

6. *Equity base – instrument*

   Salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk *open market operation* (OMO) adalah instumen yang berbasis penyertaan. Ada beberapa alasan penganjuran instrumen ini (Rostiana, 2020):

a. Sampai saat ini pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan
b. *Equity base-instrument* ini tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam.
c. Variasi harganya yang dikeluarkan bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau penalti dari pemegang saham perusahaan.
d. Kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujui.

7. Perubahan tingkat *loss & profit sharing ratio*

   Adanya variasi rasio laba rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada para wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah di bank komersial sangat disarankan, mengingat dalam mekanisme mudaharabah keuntungan yang diperoleh bisa berubah-ubah dan rasio bagi hasil dan rugi ditentukan oleh keuntungannya.

Instrumen besar kedua adalah merealisasikan tujuan sosioekonomi antara lain melalui instrumen berikut ini:

1. *Treating the created money as Fay.*

   Keuntungan bagi bank sentral karena penciptaan uang, dimana biasanya jumlah biayanya lebih kecil dari

nilai nominalnya (*money seinorage*) sudah sepantasnya disisihkan sebagian dari keuntungan tersebut sebagai *fay* (pajak) yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosioekonomi masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Alokasi dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan-kegiatan yang jelas bermanfaat.

2. *Goal oriented allocation of financing*.

   Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan dengan berhasil terdistribusinya barang dan jasa ke semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dikumpulkan oleh perbankan umumnya berasal dari sebagian besar penabung kecil namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Penerima pembiayaan harus benar-benar diteliti kemampuan usaha dan manajemenya, hal ini guna menghindari dari kegagalan karena moral hazard.

BAB 7
KRISIS MONETER

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian krisis moneter, penyebab terjadinya krisis moneter, fenomen krisis moneter dan cara mengatasinya, serta peranan kebijakn moneter terhadap perekonomian,

B. Pendahuluan

Krisis moneter atau dikenal sebagai krisis keuangan pernah dialami Indonesia pada 1998. Meski demikian, tak banyak orang tahu apa yang dimaksud dengan krisis moneter dan apa saja penyebabnya. Krisis moneter merupakan situasi di mana keadaan keuangan suatu negara tidak stabil, akibat harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Umumnya, krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan dimana investor menjual aset atau menarik dana (*rush*) dari rekening tabungan, karena takut nilai asetnya turun bahkan hilang jika tetap disimpan di lembaga keuangan. Namun ada juga situasi lain krisis moneter yang disebabkan oleh pecahnya gelembung keuangan spekulatif, kehancuran pasar saham, gagal bayar pemerintah terhadap utang negara, atau krisis mata uang.

Jika tak terkendali, krisis moneter mungkin yang tadinya terbatas pada lembaga keuangan dapat menyebar ke seluruh sektor ekonomi suaru negara bahkan di seluruh dunia, seperti yang terjadi pada 1998.

C. Pengertian Krisis Moneter

Krisis moneter merupakan situasi di mana keadaan keuangan suatu negara tidak stabil, akibat harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Umumnya, krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan dimana investor menjual aset atau menarik dana (*rush*) dari rekening tabungan, karena takut nilai asetnya turun bahkan hilang jika tetap disimpan di lembaga keuangan. Namun ada juga situasi lain krisis moneter yang disebabkan oleh pecahnya gelembung keuangan spekulatif, kehancuran pasar saham, gagal bayar pemerintah terhadap utang negara, atau krisis mata uang. Jika tak terkendali, krisis moneter mungkin yang tadinya terbatas pada lembaga keuangan dapat menyebar ke seluruh sektor ekonomi suaru negara bahkan di seluruh dunia (Arfani, 2012).

D. Penyebab Terjadinya Krisis Moneter

Krisis moneter dapat terjadi jika lembaga atau aset dinilai terlalu tinggi, dan dapat diperburuk oleh perilaku investor yang tidak rasional atau panik. Misalnya, serangkaian aksi jual yang cepat di pasar modal dapat

mengakibatkan harga saham jatuh, sehingga mendorong investor membuang saham atau melakukan penarikan tabungan dalam jumlah besar ketika rumor kegagalan bank. Ada beberapa faktor yang turut berkontribusi pada krisis moneter, yaitu kegagalan sistemik, perilaku investor atau pemodal yang tidak terkendali, insentif untuk mengambil terlalu banyak risiko, ketiadaan atau kegagalan peraturan, atau efek domino yang menyebabkan krisis menyebar dari satu lembaga ke lembaga lain bahkan antarnegara (Istiningrum, 2005).

E. Fenomena Krisis Moneter

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia ini terjadi tepatnya sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang

cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Fenomena krisis moneter ini tentu memiliki penyebab yang membuat negara ini mengalami peristiwa yang membuat negara menjadi kesusahan dalam hal ekonomi. Berikut adalah penyebab dari krisis moneter 1998 (Yudanto *et al*., n.d.):

1. Nilai Rupiah Menurun Terhadap Dolar Amerika Serikat

   Terjadinya krisis moneter ini sudah terlihat sejak awal tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus 1997. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya nilai tukar mata uang Indonesia, yaitu rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa negara tidak cukup kuat untuk menahan gempuran terhadap mata uang rupiah yang menurun. Mata uang rupiah milik Indonesia mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp 2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 per dolar AS pada akhir Januari 1998, namun turun kembali ke kisaran Rp 8.000 pada awal Mei 1999.

2. Akumulasi Yang Besar dari Utang Swasta Luar Negeri

   Masalah kedua yang bersumber dari krisis moneter tahun 1998 adalah besarnya utang luar negeri

sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 miliar dolar Amerika Serikat di antaranya merupakan utang swasta. Kabar buruknya, dua pertiga dari utang ini bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada tahun 1998. Tidak berhenti sampai di situ, cadangan devisa pada waktu itu adalah 14,44 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan juga bunganya. Hal ini kemudian memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah.

3. Pemerintah Yang Kurang Mampu Menangani Krisis

   Ketiga, masalah tata kelola, seperti kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Hal ini juga menyangkut ketidakpastian politik seputar pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Suharto saat itu

4. Solusi IMF Yang Gagal

   Berbagai pihak telah banyak melontarkan kritik terhadap IMF terkait dengan krisis moneter Asia, yang paling umum di antaranya adalah: (1) Meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi masing-masing negara tidak persis sama; (2) Program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor (Fischer, 1998b). Radelet dan Sacks menjelaskan

bahwa bantuan IMF kepada tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) tidak berhasil. Setelah melihat program penyelematan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah.

F. Peranan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di

pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negar tersebut, karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikan yang besar sekali, dan ada kalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan (Purba *et al*., 2021).

Dengan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, kestabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebut dengan kebijakan fiskal. Efektivitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan, kota

pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep, mengenai Bank Pedesaan (*rural bank*) sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI Unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan. Untuk negara berkembang, diperlukan suatu kerja sama dengan setiap Bank Umum agar mampu sebagai Bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM, diperlukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terhadap lembaga asing, juga diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter (RONALDO & WAHYUNISSA, 2017).

BAB 8
MONETER INTERNASIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Moneter Internasional; Pembayaran internasional, standar moneter internasional, harga valas, badan kewenangan moneter internasional; IMF dan World Bank.

B. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi perkembangan kegiatan perdagangan dan keuangan antar negara semakin pesat. Hampir tidak ada satu negara pun yang menutup diri dari arus globalisasi tersebut sehingga perekonomian satu negara tidak dapat lepas dari pengaruh perekonomian global. Berlakunya pasar bebas menuntut setiap negara untuk memperbaiki daya saing ekonominya baik dari segi kualitas produk yang dihasilkan, sumber daya manusia yang tangguh, maupun kondisi perekonomian yang stabil. Pasar bebas tersebut tidak hanya ditandai dengan bebasnya arus barang dan jasa yang masuk dan keluar dari suatu negara, tetapi juga arus valuta asing dan modal. Valuta asing telah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dari satu negara ke negara lain. Meskipun demikian, perkembangan yang terjadi di pasar valuta asing dapat memengaruhi perekonomian secara luas. Perkembangan pasar valuta

asing yang merupakan sektor moneter dapat memengaruhi kondisi perekonomian di sektor riil.

C. Moneter Internasional

Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dangan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Menurut Shapiro (1992) Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat dimana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dapat didefenisikan sebagai struktur, instrument, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai Negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Dalam kamus ekonomi internatioanl, mencoba untuk melengkapi definisi di atas, menyebutkan bahwa sistem Bretton Woods adalah sistem tukar tetap dengan fluktuasi yang terkendali, di mana setiap anggota Dana Moneter Internasional (IMF) menetapkan paritas khusus untuk mata uangnya relatif terhadap emas atau dolar, serta perubahan harga mata uang Negara anggota terhadap USD tidak boleh melebihi 1% dari harga parity yang ditetapkan.

D. Pembayaran Internasional

Dengan adanya perdagangan luar negeri, dimungkinkan adanya pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Seorang importir Indonesia membeli barang dari seorang eksportir Amerika, maka pembayarannya dilakukan menggunakan mata uang Amerika atau Dollar, padahal mata uang yang berlaku bagi seorang importir adalah Rupiah. Untuk itu seorang importir dalam melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dollar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer kepada eksportir di Amerika. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional di antaranya sebagai berikut (Purba *et al.,* 2021): a) Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah oleh batas negara. b) Adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. c) Komunikasi antarnegara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu.

Oleh karena dalam pembayaran internasional suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya di pasar valuta asing (Valas), maka permintaan suatu mata uang akan merupakan penawaran terhadap mata uang lainnya. Misalnya kita melakukan pertukaran US $ dengan rupiah, maka permintaan terhadap US $ merupakan penawaran rupiah, dan sebaliknya penawaran rupiah merupakan permintaan terhadap US $.

1. Cara Pembayaran Internasional

   Dari perdagangan antarnegara akan menuntut suatu negara untuk melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara dalam penyelesaian akhir dari utang piutang tersebut atau sering disebut dengan pembayaran internasional. Adapun cara untuk melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional antara lain sebagai berikut: a. Pembayaran dengan Surat Wesel Dagang (*Commercial Bill of Exchange* atau *Commercial draft atau Trade Bill*) Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa: faktur (*invoice*), konosemen atau surat muatan (*bill of lading*),daftar isi barang (*packing list*), surat keterangan asal barang (*certificate of origin*), surat keterangan pabean dan surat asuransi (*insurence*). Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seseorang (penarik wesel) yang ditujukan kepada orang lain (yang kena tarik) untuk membayar sejumlah uang tertentu (nilai nominal wesel) kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel (pemegang wesel) pada tanggal yang sudah ditentukan (hari jatuh tempo). Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum

jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain, yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo (Budaya & 2014, n.d.).

2. Kompensasi Pribadi (*Private Compensation*)

   Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal, Contoh: Yahya mempunyai utang sebanyak £ 100 kepada Mr. Samo di Inggris atau sebanyak Rp1.300.000,00 (dianggap kurs waktu itu menunjukkan £1 = Rp 13.000,00). Kemudia Zakaria mempunyai piutang sebanyak £ 100 kepada Mr. John. Dari keempat orang tersebut penyelesaian utang piutang dilakukan dengan cara Mr. John membayar utangnya kepada Mr. Samo sebanyak £ 100 dan Yahya membayar utangnya sebanyak Pp1.300.000,00 kepada Zakaria. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional.

3. Pembayaran Tunai (*Cash Payment*) atau Pembayaran di Muka Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang besar.Kelemahan cara pembayaran secara tunai di antaranya sebagai berikut: 1.

Dalam pembelian barang, importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibeli belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus menanggung biaya untuk barang yang dipesan. 2. Terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. 3. Ada kemungkinan terjadi keterlambatan datangnya barang maupun ketidakjujuran pihak eksportir. 4. Karena pengekspor berada di tempat yang jauh, maka keadaan pengekspor (bonafiditasnya) tidak sepenuhnya diketahui pengimpor.

4. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) *Letter of credit* atau *commercial letter of credit* adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir (menyetujui) dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Pada dasarnya terdapat tiga pihak yang ada dalam transaksi *letter of credit*, yaitu: opener (importir) adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada 4. *Red Clause* L/C, artinya L/C yang mencantumkan instruksi kepada *Advising Bank* (bank yang ditunjuk) untuk melaksanakan pembayaran sebagian dari jumlah L/C kepada eksportin sebelum mengapalkan barang-barang ekspor. 5. *Usance* L/C, artinya L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen.
5. Pembayaran Kemudian atau Rekening Terbuka (*Open Account*) Pembayaran kemudian atau rekening terbuka

adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan penjanjian yang disepakati bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi berisiko besar bagi pengekspor.

6. Pembayaran dengan Konsinyasi (*Consignment*) Pembayararan secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi, barang yang akan dijual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Untuk memperkecil risiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk penitipan barangnya. Apabila barang sudah terjual, pembeli membayar kepada bank sejumlah uang atas nilai barang dan sebagai gantinya bank akan menyerahkan delivery instruction kepada bonded warehouse untuk mengeluarkan barangnyabank, *issuer* (*issuing bank*) adalah bank di negara importir yang mengeluarkan L/C atas permintaan importir dan Beneficiary (eksportir), adalah pihak yang menerima pembukaan L/C oleh importir. Transaksi yang menggunakan fasilitas

L/C terdiri atas: 1. L/C biasa, artinya L/C dimana seorang importir bisa la-ngsung membayar sesuai dengan harga barang melalui bank yang ditunjuk. 2. *Merchant* L/C, artinya L/C dimana seorang importir dapat memasukkan barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran sebagian, sedangkan sisanya dibayar kemudian. 3. Indutrial L/C, artinya impor banang-barang industri atau barang modal secara cepat dan tidak dipakai untuk barang konsumsi.

7. Alat Pembayaran Internasional

   Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri karena adanya transaksi internasional diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri, yang disebut dengan devisa. Sistem devisa yang digunakan antara Negara satu dengan negara lain berbeda-beda, karena setiap Negara mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang diperlukan dalam perdagangan. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan intarnasional membentuk suatu sistem yang disebut system moneter internasional. Pembayaran yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dalam bentuk mata uang, digunakan dengan membandingkan kurs valuta asing (*exchange rate*). Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat debedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. a. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa

umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. b. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah, yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing (Wijoyo, 2021).

E. Standar Moneter Internasional

Standar moneter internasional adalah suatu standar barang atau mata uang suatu negara yang diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai mata uang dunia. Agar dapat diterima sebagai mata uang dunia maka mata uang tersebut harus memenuhi empat fungsi uang yaitu: sebagai alat tukar perdagangan, pengukur nilai, penyelesaian hutang piutang, dan alat penyimpanan nilai. Sistem moneter internasional berjalan melalui lima tahap evaluasi (Judisseno, 2002):

1. Bimetalisme

   Bimetalisme adalah kebijakan moneter dimana nilai mata uang ini terkait dengan nilai dua logam, biasanya (tetapi tidak selalu) perak dan emas. Dalam sistem ini, nilai dari dua logam akan dihubungkan satu sama lain-dengan kata lain, nilai perak akan dinyatakan dalam hale mas, dan sebaliknya dan baik logam dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dari tahun 1972, Ketika mint AS didirikan , sampai 1900, Amerika Serikat adalah negara bimetal, dengan kedua

perak dan emas diakui sebagai mata uang hukum; pada kenyataannya anda bisa membawa perak atau emas mint AS dan telah berubah menjadi koin. AS tetap nilai perak untuk emas sebagai 15:1 (1 ons emas bernilai 15 ons perak, ini kemudian disesuaikan dengan 16:1). Satu masalah dengan bimetalisme terjadi Ketika nilai nominal koin lebih rendah dari nilai sebenarnya dari logam yang dikandungan. Sebuah koin perak 1 dolar, misalnya, mungkin layak $ 1,50 dipasar perak. Nilai kesenjangan ini mengakibatkan kekeurangan perak separah orang berhenti menghabiskan koin perak dan memilih bukan untuk menjual mereka atau mereka dilebur menjadi bullions. Pada tahun 1853, kekurangan ini perak diminta pemerintah AS untuk merendahkan perak koin-kata lain, menurunkan jumalah perak dikoin. Hal ini megakibatkan koin perak lebih dalam sirkulasi. Sementara ini stabil ekonomi, juga pindah negara terhadap monometallism (penggunaan logam tunggal dalam mata uang) dan standar emas. Perak tidak lagi dilihat sebagai mata uang menarik karena koin-koin itu tidak layak nilai wajah mereka kemudian, selama perang saudara, peneimbunan emas dan perak diminta AS untuk sementara beralih kea pa yang dikenal sebagai "uang fiat" fiat uang, yang adalah apa yang kita gunakan saat ini adalah uang pemerintah menyatakan untuk menajdi legal tender, tapi itu tidak didukung atau konverrtible untu sumber daya fisik seperti logam. Pada saat ini pemerintah menghentikan uang kertas penebusan emas-perak.

2. Standar Emas (*Gold Standar*)

   Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan terjadinya perang dunia adalah sistem *Gold Standart* (standar emas). Sistem ini merupakan sistem yang paling lama berlakunya di antara sistem-sistem moneter lainnya. Sistem standar emas dimulai sekitar tahun 1870 hingga 1914. Di bawah sistem standar emas, sistem moneter internasional sifatnya sangat desentralisasi dan berbasis pasar. Sistem standar emas internasional pertama kali muncul di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pounsterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1970 hingga perang dunia pertama.

3. *Interwar period* (1915-1944)

   Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, dimana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan RUsia mengalami hiperinflasi. Contoh: Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Standar emas hancur waktu perang dunia 1 (1919-1923) pecah. Mata uang praktis ditetapkan atas dasar emas

atau mata uang lainnya dengan longgar. Beberapa negara kembali ke standar emas dilakukan sesudah perang dunia 1 berakhir. Emas hanya diperdagangkan dengan bank sentral, bukan pribadi. Kurs mata uang ditetapkan berdasarkan emas. Sesudah tahun 1934 dan sesudah perang dunia kedua, konvertibilitas mata uang yang bisa ditukarkan (konvertibel) dengan mata uang lainnya. a. Tahap 1: Nasionalisme Ekonomi akibat Perang Dunia I b. Tahap 2: Standar emas klasik gagal untuk dipulihkan (karena agenda politik masing-masing) c. Tahap 3: Ekonomi tak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran d. Tahap 4: Investor panik, ingin melarikan modal ke luar negeri, tapi semua di luar negeri juga bernasib sama.

4. Sistem Bretton Woods (1944-1976)5 Setelah masa itu kemudian muncullah periode kurs tetap.

   Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas.Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1% (naik atau turun) dari nilai par, dan bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggotanya dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Sejarah Sistem Bretton Woods bermula sekitar tahun 1930-an, dimana dunia sedang mengalami kekacuan moneter akibat perang Dunia I. Tatanan ekonomi internasional telah mengalami desintegrasi sehingga menciptakan

kekacuan nilai tukar yang bebas mengambang (*clean and dirty*), devaluasi yang berkompetensi, pengendalian pertukaran mata uang, kendala perdagangan, perang ekonomi dan moneter internasional yang terjadi antarmata uang-mata uang dan blok-blok mata uang. Perdagangan dan investasi internasional dapat dikatakan telah macet total, perdagangan yang dilakukan melalui kesepakatan barter antarpemerintah saling berkompetensi dan berkonflik satu sama lain. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu pada bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter Internasional, yang dikenal dengan *The Bretton Woods Conference,* yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Dua tahun setelah konferensi tersebut, didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut (Chapra, 2000).

5. Rezim Nilai Tukar Fleksibel/ Mengambang Terkendali
   Semenjak 1973 sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang Yen, dolar Kanada, franc Perancis, dan Swiss berfluktuas tergantung dari permintaan dan pernawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur

tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Sistem ini berlaku sejak November 1978-Agustus 1997 pada masa ini nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang adding (*basket currency*). Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun demikian Dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasiolal.

Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh Bank Sentral, serta catatan-catatan statistik Dana Moneter Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menggunakan dasar mata uang Dolar. Suatu Sistem Moneter Internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing dan interdepedensi global. Kemampuan Sistem Moneter Internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia, sebaliknya runtuhnya Sistem Moneter Internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Jika dalam skala domestik atau nasional problema ketidakseimbangan pembayaran antar daerah dapat disesuaikan melaui pergerakan modal ataupun kebijakan fiskal dan moneter, dalam skala internasional akan sedikit lebih rumit. Pembayaran yang tidak seimbang

antar negara dapat diselesaikan melalui financing, perubahan kebijakan domestik untuk menggeser pola perdagangan dan investasi, melalui kontrol devisa untuk melakukan penjatahan pasokan devisa, atau dengan cara membiarkan nilai tukar mata uang berubah sesuai situasi dan kondisi. Sehingga yang terpenting dalam sistem moneter internasional adalah tersedianya alat atau cara untuk menyesuaikan ketidakseimbangan pembayaran internasional (Akbar, 2022).

F. Harga Valas

Valuta asing adalah mata uang yang dimiliki oleh suatu negara atau penduduknya, tetapi mata uang tersebut bukan dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Mata uang tersebut adalah mata uang domestik (national currency) bagi negara yang mengeluarkannya dan merupakan alat tukar serta pembayaran yang sah di negara tersebut. Valuta asing (foreign exchange) atau biasa disingkat forex merupakan mata uang asing serta alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi dari bank sentral.

Dalam perdagangan valuta asing, jual beli dapat terjadi antar bank dengan nasabah antar bank dengan bank baik dilakukan secara langsung maupun melalui pialang. Jadi pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan penukaran suatu mata uang untuk mendapatkan mata uang lainnya, berarti ia telah menciptakan apa yang dinamakan pasar

valuta asing. Pada perdagangan valuta asing dikenal tiga jenis kurs yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. 1. Kurs Jual menunjukkan besarnya harga jual mata uang tertentu dari bank atau perusahaan penukaran valuta asing kepada investor atau masyarakat. 2. Kurs Beli menujukkan besarnya harga beli oleh perusahaan penukaran valas dari pemilik valas Kurs tengah adalah nilai kurs diantara kurs jual dan kurs beli.8 Berikut contoh perhitungan kurs jual dan kurs beli. Data kurs jual dan kurs beli di sebuah bank sebagai berikut. Kurs jual : 1 US$ = Rp14.800,00 Kurs beli : 1 US$ = Rp14.600,00 ¬ Vera berencana berlibur ke Amerika Serikat selama 5 hari. Biaya liburan yang dibutuhkan adalah 2.700US$. Berapa banyak uang rupiah yang harus disipakan vera? Untuk menukarkan mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat, Vera menggunakan kurs jual bank. Jadi uang dolar yang diperoleh Vera adalah Rp14.800,00 x 2.700 = Rp39.960.000,00 ¬ Mr.Ronald seorang turis asal Amerika serikat membawa uang sebesar 1.500US$. Ia ingin menukar uangnya dengan uang rupiah. Berapa rupiah yang akan diterima Mr.Ronald? Untuk menkarkan mata uang dolar Amerika Serikat ke rupiah Mr.Ronald dikenakan kurs beli sehingga jumlah rupiah yang diperoleh adalah Rp14.600,00 x 1.500 = Rp21.900.000,00

G. Badan Kewenangan Internasional

Sebagai upaya membangun kembali sistem ekonomi internasional yang porak poranda setelah perang dunia kedua (PD II) dan meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, 730 delegasi yang mewakili 45 negara

bertemu di Bretton Woods, New Hampsire, AS dalam rangka menghadiri *United Nations Monetary and Financial Conference* pada bulan Juli 1944. Lembaga Internasional tersebut diharapkan akan berfungsi untuk mengawasi sistem moneter internasional dan mempromosikan penghapusan pembatasan pertukaran valas yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, serta stabilisasi nilai tukar. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan *Bretton Woods Agreements*. Sebagi tindak lanjut dari kesepakatan itu maka dibentuk *Bretton Woods Institutions* (BWIs) yang terdiri dari dua institusi, *yaitu International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB).(Rahman, 2020)

1. IMF

   IMF dibentuk bulan Desember 1945. Berdasarkan akta pendiriannya (*Article I dari Article of Agreement IMF*), tujuan pembentukan IMF adalah:

   a. Meningkatkan kerjasama moneter internasional;
   b. Memfasilitasi upaya perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional;
   c. Meningkatkan stabilitas nilai tukar;
   d. Membantu pembentukan sistem pembayaran yang bersifat multilateral (*multilateral system of payment*);
   e. Memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya melalui penyediaan sumber daya dari IMF sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran negara anggotanya

f. Mempercepat penyelesaian krisis yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran. Untuk mencapai tujuan tersebut IMF menetapkan tiga fungsi utama yaitu:

   1) *Surveillance* (pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggotanya), termasuk consultations;

   2) *Lending* (memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran);

   3) *Technical Assistance* (memberikan bantuan teknis dan dan pelatihan kepada pemerintah dan bank sentral negara anggotanya).

2. *World Bank*

   Bank Dunia juga dibentuk bersamaan dengan IMF, yakni pada Juli 1944. Bank Dunia beserta the *International Development Association* (IDA) dan *the International Finance Corporation* (IFC) disebut sebagai *the World Bank Group*. Dalam *the World Bank Group* ini tergabung pula *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Adapun berbagai jenis bantuan pinjaman Bank Dunia secara formal, terdiri atas sebagai berikut (Laviza, 2009):10 1. Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara dua pihak debitur (peminjam) dengan pihak kreditur (Bank Dunia) dimana Bank Dunia telah menyetujui pinjamannya 2. Perjanjian jaminan (*Guarantee Agreement*). Perjanjian ini diadakan oleh

Bank Dunia dengan Negara anggota dimana Negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia 3. Perjanjian Proyek (*Project Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam 4. Perjanjian Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) Perjanjian ini diadakan apabila Negara peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain, misalnya pemerintah pusat meminjamkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan proyek yang telah dibiayai oleh Bank Dunia. 5. Pengaturan Kontrak Tambahan (*Additional Contractual Agreement*). Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti pembuatan akte notaris dan cara pembayaran (Manurung, 2016).

BAB 9
VARIABEL MAKROEKONOMI

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Mekanisme dasar dan hubungan saling mempengaruhi antara variabel moneter dengan berbagai variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, jumlah uang beredar, PDB. pengeluaran konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), impor (M), tingkat bunga (i), jumlah uang beredar (Ms), dan permintaan uang (Md).

B. Pendahuluan

Variabel makroekonomi adalah variabel ekonomi yang mencerminkan perilaku fenomena makroekonomi. Artinya, variabel makroekonomi, seperti namanya, adalah variabel seperti yang lain dan, oleh karena itu, mewakili karakteristik atau kualitas suatu fenomena. Dalam hal ini, menambahkan kata sifat makroekonomi memperjelas bahwa itu adalah variabel yang ada hubungannya dengan makroekonomi . Variabel makroekonomi digunakan untuk menganalisis bagian dari lingkungan ekonomi. Jadi, jika kita ingin mengetahui bagaimana interaksi ekonomi barang suatu negara dengan barang luar berkembang, kita dapat menganalisis neraca perdagangan .

Ide dasar dari variabel makroekonomi adalah untuk mencerminkan, biasanya secara numerik, bagian dari realitas ekonomi agregat. Studinya penting untuk mengetahui di mana kita berada dalam siklus ekonomi atau untuk memahami kebijakan ekonomi mana yang bisa lebih efektif. Misalnya, meskipun beberapa negara telah melakukannya, menaikkan pajak dalam krisis ekonomi umumnya tidak dianjurkan. Mengapa? Karena agen ekonomi sedang mengalami masa sulit dan perlu memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk mengatasi situasi tersebut.

C. Suku Bunga

Dalam bukunya Heri Sudarso. yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa bunga adalah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Para ekonom klasik berpendapat bahwa istilah bunga tercipta ketika terjadi kesepakatan antara kemompok yang memiliki surplus spending units (penabung) dengan kelompok yang membutuhkan dana atau deficit spending units seperti pengusaha, keduanya berinteraksi di pasar investasi. Pada waktu tingkat bunga cukup tinggi, maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang besar. Hal tersebut akan menimbulkan investor cenderung menahan dana investasinya. Jika tingkat bunga rendah,

maka investor akan lebih banyak menggunakan dananya (Hermawan, 2003).

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen dengan jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan suku bunga riil lebih menekankan rasio pada daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi. Menurut Kasmir bunga bagi bank berdasarkan konsep konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinajaman).

Menurut pandangan klasik dalam Sadono Sukirno tingkat bunga ditentungan oleh tabungan yang tersedia dalam masyrakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan Menurut N. Gregory Mankiw tingkat suku bunga dapat dibedakan secara makro yakni suku bunga nominal (*nominal interest rate*) dan suku bunga riil (*real interest rate*) . Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak

dalam berbagai kegiatan perekonomian sebagai berikut (Mukhlis, 2012):

1. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal, apakah ia akan berinvestasi pada real asset ataukah pada financial asset.
3. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
4. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah:

1. Kebutuhan dana.
2. Target laba yang diinginkan.
3. Kebijaksanaan pemerintah.
4. Jangka waktu.

D. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai tingkat kenaikan harga barangbarang pada umumnya yang terjadi pada satu kurun waktu tertentu. Tingkat inflasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen per tahun. Inflasi juga merupakan suatu keadaan perekonomian di mana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik, misalnya naiknya harga beras,

harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, di mana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi. Kenaikan tingkat harga (inflasi) yang tinggi dapat menyebabkan (Widodo, 2015):

1. Memburuknya distribusi pendapatan.
2. Berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang.
3. Terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri.
4. Timbulnya ketidakstabilan politik.

Dua macam bentuk inflasi yang disepakati para pakar ekonomi, yaitu: inflasi yang berlebihan (*hyper inflation*) dan inflasi yang bergerak dengan perlahan (*creeping inflation*).

- Bentuk-bentuk Inflasi
    a. Inflasi yang berlebihan adalah inflasi yang sangat berbahaya, sebab dapat menyebabkan kenaikan harga dengan rasio yang sangat tinggi, serta dapat menurunkan nilai harga mata uang mencapai peringkat terendah. Inflasi dengan bentuk ini muncul sebagai akibat dari:
        1) Munculnya kehancuran sosial dan munculnya aktivitas perekonomian.
        2) Ketidakmampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan terhadap rakyat.

3) Terjadinya perang yang menghancurkan Sebagai contoh dari bentuk inflasi ini, inflasi yang dialami oleh mata uang Jeman setelah Perang Dunia Pertama. Begitupula yang terjadi terhadap mata uang Irak setelah perekonomian negara tersebut diblokir.

b. Inflasi yang bergerak dengan perlahan, bentuk inflasi ini juga bisa disebut dengan inflasi menengah atau inflasi yang tidak aktif, yaitu inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga dengan perlahan tetapi berkelanjutan.

- Penyebab Inflansi

  Ada beberapa penyebab timbulnya inflasi yang disebutkan oleh para pakar ekonomi, dan dapat disimpulkan sebagai berikut (Hernawati *et al.*, 2018):

  a. Ekspansi yang dilakukan oleh bank-bank dalam memberikan I'timad. Kemudahan yang diberikan oleh bank-bank untuk memberikan I'timad terhadap organisasi-organisasi, produsenprodusen dan yang lainnya mengakibatkan penambahan pasar dengan jumlah uang yang sangat besar.

  b. Pendanaan yang melebihi standar anggaran.

  c. Keuangan belanja militer. Anggaran belanja militer, baik dana persiapan perang maupun di tengah terjadinya perang atau anggaran dana belanja pasca perang adalah salah satu sebab yang terpenting munculnya fenomena inflasi.

E. Jumlah Uang Beredar

Uang beredar dapat diartikan menjadi 2 yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). Uang dalam arti sempit (M1) dapat diartikan dengan uang yang dipegang dalam masyarakat yaitu berupa uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang dalam arti luas (M2) adalah M1 ditambah dengan uang kuasi.

Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang digunakan masyarakat untuk transaksi sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral adalah simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Indonesia dan Bank Umum yang nantinya bisa ditukarkan sengan uang kartal sesuai dengan nominalnya. Uang giral terdiri dari rekening giro berupa rupiah milik penduduk, simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, remittance, dan tabungan. (Polontalo, 2018). Secara umum jumlah uang beredar memiliki keterkaitan dengan faktorfaktor lain dalam permintaan uang, yaitu dengan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, sistem pembayaran elektronik, dan produk domestic bruto atau PDB. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan uang, yaitu mempengaruhi kenaikan jumlah uang beredar.

Hubungan antara JUB dengan faktor yang mempengaruhinya dijelaskan sebagai berikut (Persson & Skult, 2018):

1. Jumlah uang beredar memiliki hubungan positif dengan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto),

kenaikan pendapatan suatu negara yang terdiri dari berbagai sektor akan mempengaruhi kenaikan jumlah uang beredar. Ketika terjadi kenaikan pendapatan dari suatu negara, maka akan semakin banyak uang yang beredar seperti keperluan belanja baik itu dari perusahaan maupun masyarakat perorangan.

2. Jumlah uang beredar memiliki hubungan positif terhadap kenaikan inflasi. Menurut David Ricardo, kenaikan JUB dangat mempengaruhi kenaikan harga. Artinya ketika terjadi kenaikan JUB di masyarakat maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Ketika banyak masyarakat yang memegang uang daripada menaruh uangnya di bank, maka harga barang secara umum mengalami kenaikan harga. Untuk mempengaruhi tingkat JUB adalah dengan mempengaruhi tingkat suku bunga bank.
3. Alat pembayaran elektronik memiliki hubungan positif terhadap kenaikan JUB. Dengan kemudahan dan efisiensi pembayaran menjadikan pembayaran elektronik semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat menggunakan pembayaran elektronik yang mana memberikan kemudahan, tentu JUB di masyarakat akan naik, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembayaran elektronik daripada uang tunai untuk melakukan transaksi.
4. JUB di masyarakat memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat suku bunga bank. Semakin tinggi suku bunga yang dikeluarkan oleh 12 bank, maka

semakin banyak masyarakat yang akan menaruh uangnnya di bank daripada untuk memilih memegang uang. Kenaikan JUB di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kenaikan tingkat suku bunga bank.

F. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh pemerintah. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional (Sukirno, 1995). Dalam analisis makro ekonomi selalu digunakan istilah "pendapatan nasional" atau "*national income*" dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Dengan demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB).

- Metode dan Komponen Perhitungan Pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB)

  Salah satu metode perhitungan produk domestik bruto, yaitu dengan metode pengeluaran (*expenditure method*). Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

a. konsumsi Rumah Tangga/ *Household Consumption* (C)
b. Konsumsi Pemerintah/ *Government Consumption* (G)
c. Pengeluaran Investasi/ *Investment Expenditure* (I)
d. Ekspor Neto/ *Net Export* (X – M)

Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$PDB = C + G + I + (X–M)$$

Dimana:

C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi / pengeluaran pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor

- Adapun komponen dari pada perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut (Hermawan, 2003):

a. Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*) Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang (*durable goods*) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/ barang tahan lama (*non-durable goods*).

b. Konsumsl Pemerintah (*Government Consumption*) Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (*government expenditure*). Sedangkan pengeluaranpengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).

c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (*Investment Expenditure*),Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/ meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto (*net investment*), yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan.

d. Ekspor Neto (*Net Export*) Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari pada impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia) (Mukhlis, 2012).

- PDB Harga Berlaku dan PDB Harga Konstan

  Produk domestik bruto terbagi atas PDB harga berlaku dan PDB harga konstan. PDB harga berlaku merupakan hasil perkalian harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan.

PDB Berlaku= output x harga berlaku

Perhitungan PDB berdasarkan harga berlaku kurang mencerminkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya, karena adanya perbedaan harga pada setiap tahunnya akibat pengaruh inflasi. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat, maka perhitungan PDB didasarkan pada harga konstan.

PDBKonstan= output x harga konstan

PDB konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasar (based year) yang merupakan tahun dimana perekonomian dalam kondisi stabil. Harga barang pada tahun tersebut digunakan sebagai harga konstan. Nilai PDB konstan ini disebut juga sebagai PDB riil. Sedangkan nilai PDB berlaku disebut PDB nominal.

G. Pengeluaran Konsumsi (C)

Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian

menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain.

Selain pengeluaran konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di Indonesia, pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga juga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Sementara itu dalam jangka panjang pola konsumsi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Maka, rumus dari fungsi konsumsi yaitu (Rahardja, 2008);

$$C = a + b\ Yd$$

Keterangan:

C = konsumsi

Yd = pendapatan yang dapat dibelanjakan

a = konsumsi dasar tertentu yang tidak tergantung pada pendapatan

b = kecenderungan konsumsi marginal (MPC).

H. Investasi (Penanaman Modal)

Investasi adalah salah satu variabel penting dalam ekonomi. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa ekspansi dengan multiplier effect. Investasi juga menciptakan kesempatan kerja yang dapat mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah dapat memilih daerah dalam prioritas pembangunan mereka dengan regulasi yang memudahkan ijin atau insentif pajak bagi investor. Investasi adalah semua media dana yang diinvestasikan dengan harapan dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai dan hasil yang positif. Jenis investasi dapat diklasifikasikan pada kekuatan faktor seperti obligasi dan investasi aset, jaminan atau keamanan, risiko rendah atau risiko investasi yang tinggi, jangka pendek atau investasi jangka panjang, dan investasi langsung atau tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi di mana investor bisa mendapatkan keuntungan dari obligasi atau aset, misalnya membeli obligasi, kewajiban, aset riil, atau kurs mata uang asing untuk mempertahankan nilai atau mendapatkan keuntungan. Sedangkan investasi tidak langsung adalah

investasi dana atau aset kolektif, misalnya membeli obligasi dari reksa dana (portofolio) dari beberapa perusahaan, dengan hasil bahwa investor memiliki kebebasan otoritas portofolio, dan bukan dari obligasi dari perusahaan tertentu (Sukirno, 1995).

Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

- Fungsi investasi

  Kurva yang menunjukan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi.

- Penentu-penentu tingkat Investasi
  a. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan.
  b. Perubahan dan perkembangan teknologi.
  c. Efek pertumbuhan pendapatan nasional.
  d. Keuntungan perusahaan.

I. Pengeluaran Pemerintah (G)

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam

perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain untuk pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengeluaran

pemerintah juga secara khusus ditujukan dalam upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensil. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk pertanian, pembangunan industri, pengembangan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk pengembangan sektor ekonomi potensial, maka pemerintah perlu menyediakan infrastuktur dasar yang memadai.

Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli konsumen (Rahardja, 2008).

J. Ekspor (X)

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Pada umumnya dalam melakukan perdagangan ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor

adalah bagian penting dari perdagangan internasional, pengaruh ekspor terhadap perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi sebuah negara sangat besar (Nopirin 2011). Hal ini disebabkan karena tidak semua negara memiliki potensi sumber daya alam atau tenaga yang sama, ada negara yang kaya dengan sumber daya tertentu namun tidak memiliki sumber daya lain untuk masyarakat. Sementara setiap negara selalu membutuhkan berbagai jenis sumber daya tersebut untuk menjalankan kehidupan.

Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa.Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh.

Kegiatan ekspor mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Fregert & Jonung, 2010):

1. Mengendalikan Harga Produk Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Hal ini dikarenakan produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat bis diproduksi

dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia harus melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang membutuhkan produk tersebut.

2. Menambah Devisa Negara Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara.
3. Memperbanyak Lapangan Kerja Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan.

Keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya ekspor suatu negara adalah:

1. Meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat negara yang bersangkutan.
2. Tingkat inflasi dalam negeri lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi yang terjadi di negara peng impor.
3. Kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor menguntungkan.

4. Peningkatan efisiensi produksi dalamnegeri dalam arti luas, yang dapat mengakibatkan produsen barang ekspor dengan harga *free on board* (fob) yang sama dapat menghadilkan keuntungan lebih tinggi

K. Impor (M)

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan (Nopirin 2011). Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor, pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya, ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat di impor.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya impor suatu negara adalah (Lukisto & Analisa, 2014):

1. Meningkatnya tingkat kemakmuran penduduk dalam negeri.

2. Tingkat inflasi didalam negeri lebih tinggi dari pada tingkat inflasi di negara lain, khususnya di negera penghasil barang yang kita impor.
3. Kurs devisa efektif yang berlaku menguntungkan para importir.
4. Kebijaksanaan pemerintah yang merangsang impor, melalui pemberian subsidi impor, penurunan bea impor terhadap impor alat-alat kapital, bahan baku, pemenuhan kebutuhan pokok.

L. Tingkat Bunga

Tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank memiliki pengaruh terhadap spekulasi masyarakat untuk menaruh uangnya di bank. Artinya ketika terjadi kenaikan suku bunga bank, masyarakat akan lebih memilih untuk menaruh uangnya di bank daripada memegang uangnya. Sehingga yang terjadi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan banyak masyarakat menaruh uangnya di bank. Suku bunga merupakan tolak ukur dari perekonomian suatu negara yang berhubungan dengan kegiatan perputaran arus keuangan perbankan. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam perputaran dana yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk disalurkan kepada masyrakat yang kekurangan dana untuk menggerakan aktivitas perekonomian. Tingginya tingkat suku bunga merupakan salah satu penyebab kendala dari pembiayaan dalam dunia usaha sehingga berdampak pada

lemahnya sektor riil. Salah satu acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan adalah BI rate. Peningkatan ataupun penurunan pada BI rate diharapkan mampu diikuti peningkatan atau penurunan tingkat suku bunga deposito sehingga diikuti oelh pergerakan tingkat suku bunga kredit. Menurut Hempel (1994) tingkat suku bunga pinjaman merupakan gabungan dari jumlah coot of fund ditambah biaya resiko macet dan biaya intermediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga adalah:

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman kredit meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.
2. Persaingan, dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.
3. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi tingkat bunga yang sudah ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi tingkat bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang.
5. Target keuntungan yang diharapkan, Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman.

Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman juga besar dan demikian sebaliknya. Namun untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin.

6. Reputasi perusahaan, Bonafiditas (hal dapat dipercaya dengan baik dari segi kejujuran maupun kemampuannya) suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tungkata suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafid factor resiko kredit macet cukup besar.
7. Kualitas jaminan, Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan demikian sebaliknya.

M. Jumlah Uang Beredar (Ms)

Jumlah uang beredar menurut Rahardja dan Manurung (2008:324) adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (narrow money) adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral.

$$M1 = C + D$$

Dimana:

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = (*Currency*) uang kartal = uang kertas dan uang logam

D = (*Demand deposi*t) uang giral/ cek.

Uang beredar dalam arti luas (M2) adalah M1ditambah deposito berjangka (time deposit). M2 = M1 + TD.

Dimana: M2 = Jumlah uang beredar dalam arti luas TD = (*Time deposit*) deposito berjangka. Menurut Bank Indonesia mendefinisikan Uang Beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Dapat disimpulkan, bahwa jumlah uang beredar mencakup semua mata uang kertas dan mata uang logam yang beredar di mayarakat diluar peti simpanan (kas) lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dan rekening giro pada lembaga deposit (bank umum) yang dimiliki perorangan dan perusahaan (Puspopranoto, 2004:2).8 Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh kebijkan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang melalui kebijakan moneter. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah:

1. Kebijkan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan menoter (meliputi: politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif) dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal.
2. Kebijakn pemerintah melalui Menteri keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil.

3. Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga.
4. Tingkat pendapatan masyarakat.
5. Tingkat suku bunga bank.
6. Selera konsumen terhadap suatu barang (semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak, demikian sebaliknya).
7. Harga barang
8. Kebijakan kredit dari pemerintah.

N. Permintaan Uang (Md)

Permintaan uang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan (Sukirno, 2000:275). Uang tidak hanya terdiri dari uang kertas dan uang logam saja (uang kartal) tapi juga dengan memasukkan semua aktiva finansial yang dapat menjadi substitusi uang. Hal ini merupakan perwujudan dari Semakin berkembang luasnya pelayanan yang diberikan oleh Lembaga-Lembaga Keuangan. Sehubungan dengan itu ada beberapa definisi uang yang masing-masing berbeda sesuai dengan tingkat likuiditasnya yaitu kemampuan uang uang tersebut untuk segera dapat ditukarkan dengan barang (Roswita, 2003:11). Secara matematik formula permintaan uang dapat dituliskan sebagai berikut: Md = Mdtrans + Md prec Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi

dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meingkat.

BAB 10
PASAR UANG

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan tentang pengertian Pasar uang, jenis pasar uang, serta mekanisme pasar uang.

B. Pendahuluan

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka, motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT. Yang di amanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian pun akan semakin baik. Uang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena uang adalah alat transaksi yang di gunakan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari. Dalam Islam uang merupakan sesuatu yang mengalir. Maka dari itu, Islam tidak mengenal spekulasi karena semua yang ada di dunia hanyalah titipan dan pemiliknya yaitu Allah SWT.

Memang Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks, terlebih dengan fenomena ekonomi yang berkembang dengan berbagai istilah dan jenis transaksi ekonomi/keuangan baru, seperti masalah transaksi bursa efek, valuta asing, pasar uang dan lain sebagainya. Pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika di bandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indoneisa juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Transaksi di pasar uang kebanyakan melibatkan lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat berinvestasi di pasar uang dengan cara, antara lain membeli surat-surat berharga di pasar uang, seperti Sertifikat Deposito atau *Commercial Paper* maupun produk derivatif keuangan Pasar uang memudahkan bagi para peserta pasar untuk melakukan transaksi antara Bank yang memerlukan dana untuk menutupi likuiditasnya dengan Bank yang kelebihan dana akibat dananya belum tersalurkan ke pihak yang membutuhkan dengan cara membeli suart-surat berharga yang di tawarkan dalam pasar uang. Maka adanya pasar uang ini dapat memberikan keuntungan satu sama lainnya (Putri et al., 2022).

C. Pengertian Pasar Uang

Menurut Lutfi (2018) pasar uang dalam bahasa inggris disebut money market yang memiliki arti pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam jangka waktu yang pendek. Pasar uang memerlukan valuta asing yang berfungsi untuk membayar kegiatan baik ekspor maupun impor. Pasar uang ialah sebuah tempat yang digunakan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari satu tahun. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, dimana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana, sedangkan bagi pihak yang berkelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial.4

Pasar uang ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengirimkan dan membeli barang-barang persediaan, membantu membiayai kredit konsumen pada bank, membiayai kekurangan cadangan sementara dan digunakan oleh pemerintah untuk menjadi jembatan antara penerimaan pajak dan pembelanjaan. Soemitro (2017) menyatakan bahwa pasar uang syariah ialah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrument pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan

sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untu memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang relative pendek antar peserta dengan memiliki prinsip-prinsip syariah.

D. Jenis Pasar Uang

Jenis pasar uang antar lain (Jaya et al., 2022):

1. Reksa Dana Pasar Uang

   Reksa dana pasar uang merupakan salah satu jenis reksa dana yang berfokus pada berbagai produk pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Kelebihan berinvestasi pada reksa dana pasar uang yaitu bisa dimulai dari modal relative kecil maupun lebih minim risiko dibandingkan jenis reksa dana lainnya.

2. *Money market Account* (MMA)

   Money market account adalah salah satu jenis rekening tabungan, dimana periode penempatan dananya bervariasi antara mulai dari satu hingga satu tahun.

3. Surat Berharga komersial

   Surat berharga komersial sering disebut juga sebagai Commercial Paper, digunakan untuk membeli dan menjual pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman ini ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan bantuan dana jangka pendek.

4. *Eurodolar*

   Eurodolar adalah deposito yang disimpan dalam bentuk mata uang dolar dan disimpan si bank selain bank Amerika serikat.

5. *Banker's acceptance* (BA)

   Banker's acceptance merupakan salah satu pinjaman jangka pendek yang banyak digunakan pada perdagangan asing. Pada sadarnya, banker's acceptance adalah semacam jaminan bagi importr untuk membayar sejumlah produk yang diperdagangkan.

E. Mekanisme Pasar Uang

Mekanisme pasar uang konvensional hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Suryanto *et al.*, 2020):

1. Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk (instrument) tertentu, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, dan call money.
2. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar (*market maker*), lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek.
3. Prasarana komunikasi yang memadai.

4. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.

Mekanisme Callmoney yaitu bisa diperdagangkan secara langsung antar bank, dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan liquiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Mekanisme SBI dan SBPU harus diperdagangkan melaui security house (*Ficorinvest*) sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme. BI menjual SBI kepada *Ficorinvest,* barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Mekanisme untuk SBPU yaitu nasabah, baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank ataulembaga keuangan non-bank, kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui *security house* yang akan memperjualbelikan dengan BI.

Instrument pasar uang konvensional (Muchtar *et al*., 2019) :

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), adalah surat berharga yang diperjual belikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk oleh BI.
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), adalah surat berharga berbentuk hutang yang berjangka pendek dan diterbitkan oleh pemerintah.

3. Deposito, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank atas simpanan nasabahnya yang periodenya telah jatuh tempo pada tingkat suku bunga tertentu.
4. *Promissory Notes*, adalah surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas transaksi hutang piutang yang berjangka pendek antara kreditur dengan debitur.
5. *Treasury Bills,* adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara memiliki jangka waktu dibawah satu tahun.
6. *Commercial Paper,* ialah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk investor tanpa adanya jaminan (*collateral*), hal ini untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya saja.
7. *Call Money,* digunakan dalam kegiatan transaksi peminjaman sejumlah dana antar Bank-Bank dalam periode yang berjangka pendek.

Sedangkan pada Instrumen pasar uang syariah berbeda secara prinsip dengan pasar uang konvensional. Instrumennya di antaranya adalah Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Repurchase Agreement* (Repo), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), *Repurchase Agreement* (Repo) SBSN, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Secara teoritis, idiom pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrumen jangka pendek dan pasar valuta asing. Sebagaimana uang adalah darah

kehidupan dari bank sehingga mereka sebagian besar bergantung pada pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka. Untuk pengelolaan likuiditas, bank meminjam dan meminjamkan tarif uang antar bank, yang sering dikenal sebagai pasar uang antar bank. Instrumen keuangan dan dunia investasi antar bank memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit, sehingga mempertahankan pendanaan dan likuiditas mekanisme yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas di system (Z Arifin, 2013).

Pasar Uang Antar Bank Islam mengacu pada pasar uang antar bank dimana syariah Islam berlaku. Pasar Uang Antar Bank Islam tidak berbeda dari pasar uang lainnya, hanya saja ia adalah bank yang didominasi. Dengan pengecualian dari Amerika Serikat, di mana pasar uang sekuritas didominasi, dengan dana yang disalurkan melalui penggunaan surat berharga jangka pendek, seperti treasury bills dan surat. Mekanisme transaksi PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) berdasarkan pada SE 14/1/ DPM/2012 Romawi III adalah:

1. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrument PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu untuk instrument PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang.
4. BUS atau UUS yang menerbitkan instrument PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrument PUAS dimaksud pada BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing yang akan membeli instrument PUAS tersebut.
5. Jenis instrument PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan instrument PUAS sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai instrument PUAS tersebut.
6. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrument lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah (Martin et al., 2019).

Ketentuan mengenai PUAS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2000 jo PBI No.7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000 tentang PUAS. Mengenai PUAS ini juga telah dikeluarkan Fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa DSN–MUI No. 37/DSN-MUI/X/2000 tanggal 23 Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya'ban 1423 Hijriah. Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), memutuskan bahwa pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank berdasarkan bunga. Dan pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dimana pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BAB 11
PASAR VALUTA ASING

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan tentang pengertian Pasar Valas,karakteristik pasar valuta asing, proses transaksi pasar valuta asing.

B. Pendahuluan

Perkembangan bisnis internasional mendasari terbentuknya pasar keuangan berskala internasional yang turut mengalami perkembangan pesat. Salah satunya adalah pasar Valuta asing. Pasar Valuta asing adalah suatu pasar atau tempat di mana individu-individu, berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankan mengadakan jual-beli atas berbagai jenis mata uang asing dari berbagai Negara atau valuta asing. Fungsi utama Pasar Valuta asing adalah yang pertama sebagai alat tukar dalam transaksi internasional.

Transaksi internasional ini tidak terbatas pada transaksi perdagangan barang saja, tetapi juga transaksi jasa antar negara jika Indonesia ingin membeli suatu barang atau jasa dari negara lain, maka transaksi yang dipergunakan adalah menggunakan valas negara tersebut. Valas juga bisa digunakan untuk mengendalikan kurs mata uang yang ada dalam suatu negara. Sebagai sebuah alat pembayaran yang

sah dan diakui seluruh dunia, valas bisa digunakan untuk memperlancar semua transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya valas, negara-negara yang melakukan transaksi internasional dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangannya. Transaksi valuta asing dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga mencari keuntungan jangka pendek dari selisih kurs. Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik (Sudarmanto *et al*., 2021). Besarnya jumlah mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs mata uang asing.

Suatu bangsa pasti memerlukan mata uang asing dalam transaksi internasionalnya. Aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan antar dua negara atau lebih tidak semudah melakukan perdagangan yang dilakukan dalam satu negara. Hal ini karena aktivitas perdagangan internasional selalu memakai dua mata uang yang berbeda. Perdagangan antara negara yang dilakukan *Multi National Company* (MNC) terlebih dahulu harus mengkonversikan valuta lokal kedalam valuta asing. Hal ini dilakukan MNC untuk mengurangi risiko, misalnya antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat, pengimpor maupun pengekspor Indonesia harus membeli USD untuk membeli barang-barang dari Amerika, sebaliknya pengimpor Amerika harus membeli Rupiah untuk menyelesaikan pembayaran terhadap barang yang dibelinya di Indonesia (Cahyadi, 2013).

C. Pasar Valuta Asing

1. Pengertian Pasar Valuta Asing

   Foreign exchange market (Bintang et al., 2022a) atau sering pula disebut dengan bursa valas adalah suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar valas adalah untuk :

   a. Transfer daya beli
   b. Penyediaan kredit
   c. Mengurangi resiko valuta asing

   Dalam referensi lain dijelaskan bahwa, Valuta atau yang biasa disebut dengan valas (Yulius, 2019), atau dalam bahasa asing dikenal dengan *foreign exchange* (*Forex*) merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau *foreign exchange market*.

2. Peserta / Pemain Dalam Pasar Valuta Asing

   Transaksi di pasar valas terdiri atas 2 jenis tingkatan yaitu antar bank atau wholesale market dan klien atau retail market (Bintang *et al*., 2022b).

3. Dealer Valas Bank dan Non Bank

   Dealer, valas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli valas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa valas yang dikhususkan.

4. Perusahaan dan Individu

   Perusahaan dan individu menggunakan pasar valas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas importir importir, investor portfolio internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valas untuk tujuan investasi.

5. Spekulator dan Arbitrase

   Spekulator dan Arbitrase melekukan transaksi dalam pasar valas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu betuk spekulasi yang terdapat dalam pasar valas, dimana mereka membeli valas di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan abritrase ini dimungnkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lain.

6. Bank Sentral

   Bank-Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devis dan juga mempengaruhi harga dimana mata uangnya diperdagangkan. Bank

sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri.

D. Karakteristik Pasar Valuta Asing

Tidak ada sebuah keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya sebuah transaksi di luar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar yang tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak pasar valuta asing yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dimana mata uang yang bebeda diperdagangkan, maka secara tidak langsung "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung bank mana atau perlu pasar mana yang bertransaksi". Tetapi dalam praktiknya perbedaan itu seringkali sangat tipis (Alqodri *et al.*, 2015).

Pusat pardagangan utama ialah New York, London, Singapura serta Tokyo tetapi bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi dengan sepanjang hari. Jika pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibka serta pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai serta kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan. Mata uang yang diperdagangkan satu dengan yang lainnya serta setiap pasangan mata uang adalah produk terdiri seperti contohnya EUR, USD, GBP/USD, USD/JPY serta lainnya. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY serta GBP/USD, hal ini merupakan koreksi antara USD/JPY serta GBP/USD.

E. Proses Transaksi Pasar Valuta Asing

1. Transaksi Pasar Valas Konvensional

   Transaksi valuta asing (Yuliati, 2007) dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu kemudian ditutup dengan membeli.Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB.

   Dalam perkembangan sejarah, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut hasil survei BIS (*Bank International for Settement*, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$ 1,4 triliun perharinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga menjadi salah satu alternatif yang paling populer karena ROI (*retum on investment* atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan

pada umumnya. Akibat dari pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki resiko yang tinggi. Karena hal ini wajar ketika tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Negara Asia begitu pula tahun 1991 di Amerika. Pasar Valuta Asing memiliki jenis-jenis tersendiri diantaranya (Gustaf Wowiling *et al.*, 2016):

2. Pasar Modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder, yang terbagi lagi menjadi :
    a. Pasar Saham, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan saranan perdagangan saham.
    b. Pasar 0bligasi, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi.
    c. Pasar Keuangan yang merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi.
    d. Pasar derivatif yang merupakan sarana untuk menyediakan instrumen guna mengelola resiko keuangan.
    e. Pasar berjangka yang merupakan sarana untuk menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal dimasa mendatang.
    f. Pasar Asuransi yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai resiko.
    g. Pasar valuta asing yang memfasilitasi perdagangan valuta asing.

3. Pasar Komoditi yang memfasilitasi perdagangan komoditi.

   Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan (pasar modal dan pasar uang) memiliki pengaruh besar menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Kedua jenis pasar tersebut jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada investor, pelaku usaha, masyarakat dan perekonomian nasional. Investasi di Pasar Komoditi mempunyai potensi keuntungan lebih besar dibandingkan tabungan atau deposito, bahkan bisa melebihi saham atau obligasi. Namun demikian, investasi di Pasar Komoditi (khususnya Perdagangan Berjangka) harus dilakukan dengan berhati-hati karena memiliki risiko lebih besar serta tidak dijamin oleh Pemerintah.

   Kemajuan ekonomi Indonesia ikut mendorong perkembangan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditi. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah mendorong meningkatnya minat investasi di pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi. Bank Dunia menyatakan jumlah kelas menengah Indonesia tahun 2010 sebesar 56,5 % dari total penduduk (setara dengan 135 juta orang). Menurut hasil riset *Standard Chartered Bank* jumlah orang sangat mapan di Indonesia (berpenghasilan Rp 240 juta/ tahun atau berinvestasi Rp 150 juta/ tahun) sebanyak 4 juta orang. Kondisi ekonomi nasional yang semakin membaik menjadikan *World Economic Forum* menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia peringkat ke-

18 sehingga masuk jajaran negara elit G-20. Sejak Desember 2011, Indonesia mendapatkan kembali status negara layak investasi (*investment grade*) yang terlepas sejak krisis moneter 1997. Pada tahun 2037, PDB per kapita Indonesia diperkirakan di atas 18.000 dollar AS per tahun, sehingga negara kita layak menyandang status negara maju dengan jumlah penduduk 370 juta orang. Menurut studi Citibank, pada tahun 2037 Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia setelah China, AS, India, Jepang, Jerman, dan Rusia.

4. Transaksi Pasar Valas Syariah

Allah SWT dan Rasulnya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi perdagangan sebagai suatu yang halal atau dibolehkan dan melarang mengambil benda orang lain secara batil. Selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan baik dan harmonis dikalangan anggota masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah meletak dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksidan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu.

Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah menyebutkan prinsih-prinsip syari'ah dalam transasksi valuta asing sebagai berikut :

a. Pertukaran harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd)*, artinya masingmasing pihak harus menerima atau

menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan

b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, transaksi perdagangan barang dan jasa atar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya si A setuju membeli barang hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa mendatang.

d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainaih*).

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. (2022). *Ekonomi Moneter*. https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/tx8zu.html

Alqodri, F., Lestari, S., SEMNASTEKNOMEDIA, N. W.-, & 2015, undefined. (2015). Teknologi Trading Berbasis Expert Advisor (EA) pada Pasar Valuta Asing dengan Teknik Kalender Ekonomi. *Ojs.Amikom.Ac.Id*, 6–8. https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/817

Arfani, R. (2012). *Reformasi Sistem Moneter Internasional Pasca Krisis Finansial 2007/2008*. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/122065

Arif, M. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38514/2/Buku_Lemb Keu Sy.pdf

Bintang, I., Dei Susilo, F., Pujiatma, D., Subchanifa, V., Hamzah, R. A., Hastuti, D., & Komarlina, L. (2022a). Efisiensi Pasar Valuta Asing di Indonesia: Analisis Empiris. *Jurnal.Unsil.Ac.Id*, *3*(1). https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/4794

Bintang, I., Dei Susilo, F., Pujiatma, D., Subchanifa, V., Hamzah, R. A., Hastuti, D., & Komarlina, L. (2022b). Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. *Jurnal.Untirta.Ac.Id*, *3*(1). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/9842

Budaya, I. I.-I. dan, & 2014, undefined. (n.d.). International Monetary Fund (IMF) dan Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia. *Repository.Unas.Ac.Id*. Retrieved January 11, 2023, from http://repository.unas.ac.id/82/

Cahyadi, Y. (2013). Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software Metatrader: Sebuah Alternatif. *Journal.Binus.Ac.Id*, *4*(Mei), 262–273. https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1053

Chapra, M. (2000). *Sistem moneter islam*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=v0Sthnla3-0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=moneter+internasional&ots=jlqunnBTPp&sig=iyOLRn2RlZxB2f3g5e5YR1Xqv3g

Fregert, K., & Jonung, L. (2010). *Makroekonomi: teori, politik och institutioner*. https://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/31-7-ya.pdf

G, H., Anwar, K., Umiyati, H., Amas Priatna, I., Sulaiman, S., Rustandi Kartawinata, B., Zainuddin, A., Murdiyanto, E., Akbar, T., Wahyuni, A., Mochamad Aziz, R., & Damayanti, E. (2022). *EKONOMI MONETER*. https://repository.penerbitwidina.com/publications/557923/ekonomi-moneter

Gustaf Wowiling, L., Oldy Rotinsulu, T., Th Maramis, M. B., Ilmu Ekonomi Pembangunan, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2016). Penentuan Tingkat Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat Di Pasar Valuta Asing Indonesia (PERIODE 1998.1–2014). *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, *16*(03). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13571

Harahap, M. I. (2020). *Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah*. http://repository.uinsu.ac.id/8607/1/Diktat Pasar Modal.pdf

Harahap, N. H., Nurtivanny, F., Luthfi, M., Siregar, P., Kamil, R., Tambunan, K., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Penerapan Dinar Dan Dirham Sebagai Alternatif Standar Moneter Internasional: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnaluniv45sby.Ac.Id*, *1*(3).

https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/511

Harahap, S. (2019). Pemikiran Imam Al-Ghaszali Tentang Fungsi Uang. *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/9401/0

Hermawan, I. (2003). Analisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap perkembangan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. *Bmeb.Researchcommons.Org*, *13*. https://doi.org/10.21098/bemp.v13i4

Hernawati, H., Oktaviani,) &, & Puspasari, R. (2018). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah. *Ejournal.Iainsurakarta.Ac.Id*, *1*(1), 29–44. http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/1134

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-mo9ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fungsi+lembaga+keuangan+syariah&ots=yhMTXX-vyEk&sig=pOdy6Ujc7qXgSllEiWXViV5voJM

Huzain, H. (2022). *Konsep Uang Dalam Islam*. https://osf.io/g2uwz/download

Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journals.Ums.Ac.Id*. https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11646

Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal.Iainkudus.Ac.Id*. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1695/1507

Iqbal, M. (2019). Konsep uang dalam Islam. *Jurnalfai-Uikabogor.Org*. https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/view/359

Istiningrum, A. (2005). Perbandingan kinerja keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di bej sebelum dan selama krisis moneter. *Journal.Uny.Ac.Id*. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/1776

Jaya, A., Wahab, A., Management, M. L.-I. J. of, & 2022, U. (2022). Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam. *Dmi-Journals.Org*. https://www.dmi-journals.org/ijms/article/view/246

Judisseno, R. (2002). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lf6v1QirwDkC&oi=fnd&pg=PR17&dq=moneter+internasional&ots=jVsRqlo0Bv&sig=C012_EpHmly1pLsVoKB09SHs16I

Juliana, J. (2017). Uang dalam Pandangan Islam: Kritik terhadap Konsep Grasham. *Ejournal.Unisba.Ac.Id*, *1*(2), 217–230. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2583

Kuncoro, H. (2021). *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mY8fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA157&dq=moneter+internasional&ots=_zG6JxkzgH&sig=IE1oG9Q5a8E_3ibG1pQCRiZGEd4

Lariba, A. R.-J. of I. E. (2011). Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal.Uii.Ac.Id*, *19*(1). https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/3711

Lukisto, J., & Analisa, N. A. (2014). Dampak Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti Di Indonesia Periode Tahun 1994-2012. *Repository.Petra.Ac.Id*. http://repository.petra.ac.id/16881/

Manurung, M. (2016). *Amerika dalam sistem moneter internasional 2005-2015= China s exchange rate policy*

and American hegemony status in the international monetary system 2005 …. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20432831

Martin, Nababan, & Ade. (2019). *Peramalan Pasar Barang dan Pasar Uang Yang Terjadi di Indonesia Kajian Pada Model Mundell-Fleming*. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97410

Muchtar, E., Asy-Syukriyyah, S. N.-J., & 2019, U. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang. *Jurnal.Asy-Syukriyyah.Ac.Id*. http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/41

Mukhlis, I. (2012). Kinerja keuangan bank dan stabilitas makroekonomi terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal.Unmer.Ac.Id*. https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371

Persson, M., & Skult, E. (2018). *Tillämpad makroekonomi*. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1271504

Purba, B., Purba, D., Purba, P., Nainggolan, P., & Susanti, E. (2021). *Ekonomi Internasional*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=r6UhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=moneter+internasional&ots=edZmbes5Wm&sig=aNIrtINH3cVjz30ZC-3qrT6csyXs

Putri, A., Converence, E. W.-M. D. P. S., & 2022, U. (2022). Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal.Mdp.Ac.Id*. https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1721

Rahardja, P. (2008). *Pengantar Ilmu ekonomi: mikroekonomi dan makroekonomi*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14885&keywords=

Rahman, A. (2020). *Demokrasi Mata Uang: Teori Moneter Global Organik-Rangkuman*. https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/zp8yk.html

Ronaldo, E., & Wahyunissa, D. (2017). Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional Dan Krisis Moneter Di Indonesia. *Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/52909225/346932011-Analisis-Sistem-Moneter-Internasional-Dan-Krisis-Moneter-Di-Indonesia.pdf

Rostiana, S. E. (2020). *Ekonomi Moneter Internasional*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XN-8MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=moneter+internasional&ots=eTQPBNpAsw&sig=1WDu_zIdU-Tbh-czp_EYLrPo1CcI

Siagian, A. (2021). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WnwmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fungsi+lembaga+keuangan+syariah&ots=7TKneCageJ&sig=4yklQTfs5yfYKfjNFJClIF1-XOc

Soemitra, A. (2017a). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=y92VDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=fungsi+lembaga+keuangan+syariah&ots=FDS4QolrxI&sig=75T28Epc1tyJRGUWrRMwrLaCv6o

Soemitra, A. (2017b). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0SFADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fungsi+lembaga+keuangan+syariah&ots=_jX-6V3Z-cd&sig=PX0BtRPz5vdqXvwb5M6JqCgIh2M

Sudarmanto, E., Khairad, F., Damanik, D., & Purba, E. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LgIDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=pasar+valuta+asing&ots=vks8TDbeNo&sig=eP8T7hgdbTNY9P9OvZf30lqpHPc

Sukirno, S. (1995). *Pengantar teori makroekonomi edisi kedua*. http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21153&lokasi=lokal

Suryanto, S., (JIKA, A. A.-J. I. K. dan P., & 2020, U. (2020). Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Ojs.Unikom.Ac.Id*. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/3221

Widodo, A. (2015). Faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. *Journal.Umy.Ac.Id*, *16*(1), 63–72. http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1222

Wijoyo, H. (2021). *Ekonomi internasional*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gvgkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=moneter+internasional&ots=dhhEe36Jsx&sig=sbVK1X8jsCc_0bB2p6LI9Smqgyo

Yudanto, N., Monetary, M. S.-B. of, & 2014, undefined. (n.d.). Dampak krisis moneter terhadap sektor riil. *Bmeb.Researchcommons.Org*. Retrieved January 11, 2023, from https://bmeb.researchcommons.org/bmeb/vol1/iss2/7/

Yuliati, R. (2007). *Analisis Tingkat Hubungan Pasar Valutaasing Indonesia Dengan Pasar Valuta Asing Global*. https://eprints.umm.ac.id/7954/

Yulius, H. (2019). Penggalian Data Pantauan Pasar Valuta Asing. *Researchgate.Net*. https://doi.org/10.5281/zenodo.3966695

Z Arifin. (2013). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Bmeb.Researchcommons.Org*. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3

BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Taufiq Abadi dilahirkan di Lamongan 28 Agustus 1991, dari pasangan Sudarmaji dan Rukiyah. Keluarga besar dan lingkunagnya adalah pertanian,pendek kata kehidupannya kental dengan perjuangan untuk memuliakan diri. Ia mempersunting Marfita Hikmatul Aini, yang dikenalnya saat sedang berjuang menjadi dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Riwayat Pendidikan, Taufiq adalah lulusan dari Magister Manajemen Unissula semarang. Saat S1 menuntut ilmu di Universitas Pekalongan mengambil konsentrasi managemen Keuangan. Beberapa karya yang pernah di tulis adalah tulisan di jurnal local maupun nasional di bidang manajemen keuangan.

Riwayat Pekerjaan, Taufiq dulu merupakan pedagang kaki lima di bidang kuliner yang terus ingin belajar menuntut ilmu, pernah berjualan es kopyor keliling, jualan pecel lele dan soto lamongan saat kuliah, serta pernah menjadi *marketing* di beberapa perusahaan.

Saat ini menjadi Tenaga Pendidik (Dosen) Di UIN K.H. Abdurrahman Wahid dengan berbagai mata kuliah yang pernah diampu diantaranya: Kewirasuahaan, Ekonomi Koperasi, Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Moneter, Statistik, Pengantar bisnis & Manajemen, Manajemen Keuangan.

نهضة العلماء
N U

LPNU
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLOTUL 'ULAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

EKONOMI MONETER

SEBUAH PENGANTAR

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan terjadinya peningkatan output keseimbangan. Atas dasar kenyataan tersebut, secara otomatis menjadikan perguruan tinggi sebagai Lembaga Pendidikan harus turut mendukung dan berusaha mewujudkan lulusan yang siap meningkatkan perekonomian nasional.

Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah/mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya memepertahankan kemampuan ekonomi umtuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Secara operasional, Bank Indonesia melakukan pengendalian sasaran-sasaran moneter dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. Melalui buku ini, penulis melakukan pembahasan dan analisis kritis kebijakan ekonomi moneter dilengkapi interpretasi secara terukur. Tentunya buku ini dapat menjadi salah satu refrensi bagi dosen dan mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mendalami Ekonomi Moneter.

ZAHIR publishing
zahirpublishing@gmail.com
www.zahirpublishing.net

ISBN 978-623-466-189-7 (PDF)
9 786234 661897